



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal merupakan salah satu upaya pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Tim Penerapan SPM Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah.

(4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah terdiri atas:

- a. penanggung jawab : Bupati;
- b. ketua : Sekretaris Daerah;
- c. wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- e. anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan terkait pelayanan dasar;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 6. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan daerah

BAB IV

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri atas:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB V
INTEGRASI SPM

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen perencanaan meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM:
 - a. memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD; dan
 - b. memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB VI
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. indikator kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber Pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (2) Dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penerapan SPM:
 - a. memprioritaskan pendanaan untuk kegiatan penerapan SPM dari APBD; dan

- b. dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat melalui:
1. kerja sama dengan daerah lain;
 2. kerja sama dengan pihak ketiga;
 3. kerja sama dengan Badan Usaha;
 4. mengusulkan pembiayaan dari APBN; dan
 5. upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

BAB IX

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

- (2) Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 53

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN

2023-2027

LANGKAH OPERASIONAL DAN STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DAERAH TAHUN 2023-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Blora menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Blora terletak di Provinsi Jawa Tengah pada bagian timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sebesar 1.955,8219 km² atau sekitar 6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, letak Kabupaten Blora di perbatasan antar provinsi memberikan potensi baik kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik maupun dalam *market share* untuk produk Kabupaten Blora dalam pengembangan kawasan tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111^o16' s.d. 111^o338' Bujur Timur dan 6^o528' s.d. 7^o248' Lintang Selatan. Secara geografis, letak pada posisi lintang memberikan sinar matahari sepanjang tahun yang mendukung perkembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Tabel I.1 menunjukkan wilayah administrasi lain yang bertampalan batas dengan Kabupaten Blora, baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora terdiri dari 16 Kecamatan dengan indeks kawasan perkotaan tertinggi berada di Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu.

Tabel 1.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

NO	BATAS WILAYAH	WILAYAH ADMINISTRASI LAIN	KECAMATAN DI KABUPATEN BLORA YANG BERBATASAN
1	Sebelah Utara	Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	Blora, Japah, Tunjungan, Bogorejo.
2	Sebelah Timur	Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	Bogorejo, Jiken, Sambong, Cepu, Kradenan, Kedungtuban
3	Sebelah Selatan	Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur	Kradenan, Jati
4	Sebelah Barat	Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah	Kundurana, Jati

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

1.3.2. Topografi

Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Blora didominasi oleh wilayah dengan ketinggian di atas 41 mdpl (nyaris 98% wilayah). Tabel I.2 merinci luas wilayah pada setiap kecamatan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut.

Tabel 1.2 Ketinggian dari Permukaan Air Laut Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

NO	KECAMATAN	LUAS BERDASAR KETINGGIAN (HEKTAR)					TOTAL
		0-100 mdpl	120-200 mdpl	220-280 mdpl	280-360 mdpl	360-420 mdpl	
1	Jati	7.320,02	3.546,96	10.584,87	85,81	0	21.537,66
2	Randublatung	9.212,95	2.058,72	12.029,85	290,31	0	23.591,82
3	Kradenan	4.002,73	2.047,34	4.910,62	243,66	0	11.204,35
4	Kedungtuban	5.598,14	0	4.971,68	275,40	0	10.845,22
5	Cepu	4.161,63	0	742,22	0	0	4.903,85
6	Sambong	2.097,17	549,99	6.005,26	1.583,79	31,57	10.267,78
7	Jiken	1.778,34	1.855,39	9.067,01	3.607,83	231,38	16.539,96
8	Bogorejo	2.029,95	0	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9	Jepon	5.184,55	0	4.684,01	2.024,63	25,73	11.918,93
10	Blora	5.653,50	0	1.068,35	510,68	0	7.232,53
11	Banjarejo	6.171,81	0	3.147,06	1.745,21	0	11.064,08
12	Tunjungan	6.789,83	0	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97

NO	KECAMATAN	LUAS BERDASAR KETINGGIAN (HEKTAR)					TOTAL
		0-100 mdpl	120-200 mdpl	220-280 mdpl	280-360 mdpl	360-420 mdpl	
13	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14	Ngawen	7.941,74	281,59	2.262,77	0	0	10.486,11
15	Kundurana	11.244,13	936,15	291,99	0	0	12.472,27
16	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

Terdapat tujuh kecamatan yang berada pada ketinggian tertinggi 360-420 mdpl, yaitu Kecamatan Sambong, Jiken, Bogorejo, Jepon, Tunjungan, Japah dan Todanan dengan luas total 515,53 hektar. Luasan terbesar berada pada ketinggian 0-100 mdpl seluas lebih dari 80.000 hektar. Sementara itu, pada ketinggian 220-280 mdpl, terdapat 78.094 ha wilayah yang tersebar pada seluruh kecamatan.

Dengan distribusi wilayah komoditas yang dapat dikembangkan adalah padi dan palawija. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan padi sudah tepat bila dilihat dari potensi fisik dasar kabupaten. Pertanian padi telah lama menjadi sektor ekonomi produktif dan dominan di Kabupaten Blora. Dengan dukungan sektor fisik dasar dari aspek topografi, padi diharapkan dapat terus produktif. Apabila terjadi penurunan produktivitas padi, maka diperlukan intervensi terhadap hal lain seperti teknis produksi (pola tanam, pengairan, bibit, atau pupuk), atau pengolahan pasca panen (pemanenan, penyimpanan, dan pengangkutan).

Kabupaten Blora bila dilihat dari aspek kelerengan wilayah, terbagi dalam empat klasifikasi seperti dapat dilihat pada Tabel II.4. yang mana didominasi oleh kelerengan datar hingga landai (0-15%) dengan luas sebesar 131.773,3 hektar. Hanya terdapat kurang dari 1% wilayah yang memiliki kelerengan curam dan kemampuan pengembangan terbatas. Secara umum, wilayah Kabupaten Blora memiliki kemudahan pengerjaan konstruksi yang baik sehingga potensial untuk dikembangkan aktivitas keruangan pada wilayah lereng Kabupaten.

Selanjutnya secara detil informasi kemiringan disajikan dalam Tabel I.3 yang memperlihatkan Kecamatan Japah, Todanan, Jepon dan Jiken memiliki wilayah kelerengan di atas >15% yang cukup besar (lebih dari 2.000 ha). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pemantauan ketat dalam pengembangan kawasan terbangun melalui pembatasan intensitas bangunan. Untuk itu, perlu diterapkan prosedur pengendalian dalam perijinan pendirian bangunan yang berada pada wilayah dengan kelerengan 15-40%.

Tabel 1.3 Kemiringan Lereng Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora

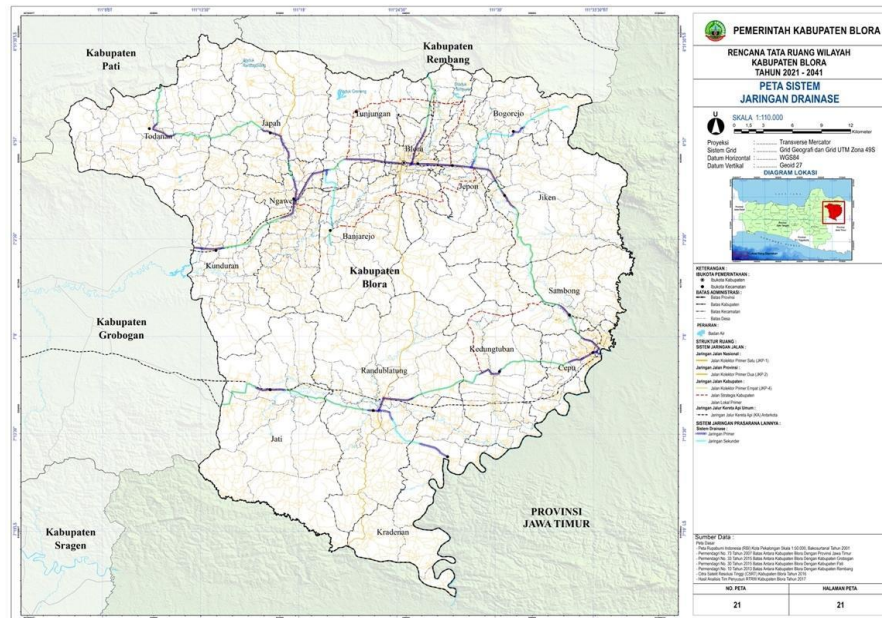
NO	KECAMATAN	LUAS BERDASAR KEMIRINGAN (HEKTAR)					TOTAL
		0 - 2 %	2 - 5 %	5 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
1	Jati	7.320,02	5.275,32	8.856,51	85,81	0	21.537,66
2	Randublatung	9.212,95	7.464,07	6.624,49	290,31	0	23.591,82
3	Kradenan	4.002,73	2.047,34	4.910,62	243,66	0	11.204,35
4	Kedungtuban	5.598,14	1.731,07	3.240,61	275,40	0	10.845,22
5	Cepu	4.161,63	742,22	0		0	4.903,85
6	Sambong	2.097,17	3.123,74	3.431,22	1.584,07	31,57	10.267,78
7	Jiken	1.778,34	2.253,27	8.669,13	3.607,83	231,38	16.539,96
8	Bogorejo	2.029,95	0	2.431,82	1.610,06	10,32	6.082,15
9	Jepon	5.184,55	1.264,67	3.419,35	2.024,63	25,73	11.918,93
10	Blora	5.653,50	1,84	1.066,51	510,68	0	7.232,53
11	Banjarejo	6.171,81	1.261,21	1.885,84	1.745,21	0	11.064,08
12	Tunjungan	6.789,83	0	975,98	1.127,46	42,70	8.935,97
13	Japah	3.901,40	878,05	5.186,02	2.898,57	58,52	12.922,56
14	Ngawen	7.941,22	1.683,86	861,03	0	0	10.486,11
15	Kunduran	11.244,13	1.059,10	169,04	0	0	12.472,27
16	Todanan	17,94	2.103,60	9.735,35	3.604,81	115,31	15.577,00
		83.105,31	30.889,36	61.463,52	19.608,50	515,53	195.582,24

Sumber: RTRW Kabupaten Blora Tahun 2021-2041

1.3.3. Hidrologi

Data hidrologi, terutama informasi mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi dasar untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi pengembangan dengan dukungan ketersediaan pengairan dari sungai, maupun kecamatan-kecamatan yang memiliki kerawanan banjir karena lokasi yang dekat dengan sungai. Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan sebaran sungai yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase di Kabupaten Blora.

Gambar 1.1 Peta Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai di Kabupaten Blora



Sungai Lusi berasal dari mata air di Pegunungan Kapur Utara (dalam wilayah Kabupaten Rembang) dan merupakan sungai terbesar yang melintas di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora masuk wilayah aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratun Seluna yang terdiri dari tiga sub DAS, yaitu subDAS Lusi, subDAS Juwana dan subDAS Bengawan Solo. Sub DAS Lusi yang merupakan sungai terbesar meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan, Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan. Sementara itu, sub DAS Juwana yang berada di bagian utara wilayah Kecamatan Todanan. Terakhir, sub DAS Bengawan Solo pada wilayah Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban, Kradenan, Randublatung dan Jati.

1.3.4. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Blora, jumlah penduduk Kabupaten Blora telah tumbuh dari 862.110 jiwa pada tahun 2018, menjadi 888.224 jiwa pada tahun 2022. Tabel I.5 di bawah ini memaparkan distribusi penduduk di Kabupaten Blora berdasarkan Kecamatan pada lima tahun terakhir.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jati	215,38	46.595	51.923	49.143	49.340	49.507
2	Randublatung	235,92	76.543	81.457	77.649	77.692	77.687
3	Kradenan	112,04	40.198	42.816	41.062	41.125	41.163
4	Keduntuban	108,45	56.222	60.555	57.447	57.531	57.578
5	Cepu	49,04	74.412	78.175	76.370	76.474	76.530
6	Sambong	102,68	25.773	29.070	27.659	27.823	27.970

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
7	Jiken	165,40	39.234	39.793	38.374	38.314	38.415
8	Bogorejo	60,82	24.324	25.860	24.805	24.827	24.834
9	Jepon	119,19	61.931	65.252	62.824	62.952	63.040
10	Blora	72,33	95.021	96.522	93.779	93.691	94.175
11	Banjarejo	110,64	59.092	65.454	62.152	62.426	62.661
12	Tunjungan	89,36	47.075	50.043	47.981	48.098	48.185
13	Japah	129,23	34.683	37.224	35.310	35.362	35.392
14	Ngawen	104,86	58.021	64.416	60.559	60.773	60.948
15	Kunduran	124,72	64.180	70.245	66.189	66.337	66.443
16	Todanan	155,77	58.806	66.837	63.030	63.382	63.696
Jumlah		1.955,82	862.110	925.642	884.333	886.147	888.224

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023 dan RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

Berdasarkan tabel I.5 di atas, laju pertumbuhan rata-rata selama lima tahun hanya sebesar 0,75% per tahun. Angka ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah yang berkisar di angka 1% per tahun.

Selain itu, dapat dilihat bahwa dalam periode 2018-2022, sebaran penduduk tetap terkonsentrasi pada Kecamatan-kecamatan di wilayah tengah seperti Blora, Cepu, dan Randublatung. Tabel di bawah ini menunjukkan dinamika angka kepadatan penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022. Kecamatan lain yang menonjol adalah Cepu dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain yang bertampalan batas.

Tabel 1.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jati	215,38	216,3	241,1	228,2	229,1	229,9
2	Randublatung	235,92	324,4	345,3	329,1	329,3	329,3
3	Kradenan	112,04	358,8	382,1	366,5	367,1	367,4
4	Kedungtuban	108,45	518,4	558,4	529,7	530,5	530,9
5	Cepu	49,04	1.517,4	1.594,1	1.557,3	1.559,4	1.560,6
6	Sambong	102,68	251,0	283,1	269,4	271,0	272,4
7	Jiken	165,40	237,2	240,6	232,0	231,6	232,3

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
8	Bogorejo	60,82	399,9	425,2	407,8	408,2	408,3
9	Jepon	119,19	519,6	547,5	527,1	528,2	528,9
10	Blora	72,33	1.313,7	1.334,5	1.296,5	1.295,3	1.302,0
11	Banjarejo	110,64	534,1	591,6	561,7	564,2	566,4
12	Tunjungan	89,36	526,8	560,0	536,9	538,2	539,2
13	Japah	129,23	268,4	288,0	273,2	273,6	273,9
14	Ngawen	104,86	553,3	614,3	577,5	579,6	581,2
15	Kundurán	124,72	514,6	563,2	530,7	531,9	532,7
16	Todanan	155,77	377,5	429,1	404,6	406,9	408,9
Jumlah		1.955,82	440,8	473,3	452,2	453,1	454,1

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023 dan RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

Bila dilihat secara keruangan, kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi adalah kecamatan yang berada di perlintasan transportasi antar Provinsi, pengecualiannya adalah Cepu yang memiliki populasi tinggi karena aktivitas ekonomi propulsifnya berupa pertambangan.

Bila dilihat dengan perspektif kapasitas ruang, maka persebaran kepadatan penduduk menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Konsentrasi penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Cepu, yang diikuti oleh Kecamatan Blora. Hal ini sesuai dengan pengembangan pusat layanan perkotaan yang berlokasi pada kedua Kecamatan tersebut.

Karakteristik demografi lain yang penting untuk perencanaan pembangunan adalah rasio menurut jenis kelamin, serta distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur. Di Kabupaten Blora, rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan Kabupaten Blora pada tahun 2022 adalah 454. Hal ini dapat dikatakan setara, sehingga kebutuhan untuk penyediaan layanan yang setara semakin besar. Pemahaman mengenai rasio jenis kelamin akan memberikan dasar untuk menyusun perencanaan berbasis gender dalam rangka memastikan pembangunan yang lebih setara. Informasi jumlah penduduk menurut umur disajikan dalam Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

UMUR (TH)	2018	2019	2020	2021	2022
0 - 4	61.384	55.248	52.260	51.405	51.642
5 - 9	66.285	62.769	59.267	62.554	60.098
10 - 14	65.208	64.767	63.791	68.401	67.675

UMUR (TH)	2018	2019	2020	2021	2022
15 - 19	62.285	58.850	68.364	68.216	66.083
20 - 24	59.978	56.670	66.468	70.978	70.109
25 - 29	58.562	63.070	65.296	67.317	65.896
30 - 34	61.154	62.757	66.351	65.390	63.674
35 - 39	63.292	67.090	65.826	70.469	66.018
40 - 44	63.884	68.540	68.332	73.390	71.869
45 - 49	65.564	61.126	64.253	66.925	64.840
50 - 54	61.194	61.006	61.990	64.242	64.660
55 - 59	53.532	51.702	56.855	61.707	60.455
60 - 64	37.743	42.284	46.821	53.094	51.770
65 - 69	26.662	27.595	35.400	38.775	36.073
70 - 75	21.735	23.722	20.154	24.680	22.568
75 +	33.648	33.761	22.905	39.451	27.818

Sumber: www.blorakab.bps.go.id; *Blora Dalam Angka 2023*

Pemahaman mengenai struktur penduduk menurut umur akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan sektor produktif untuk memastikan angka beban ketergantungan yang tercipta dari kelompok umur non-produktif dapat ditangani oleh penduduk usia produktif. Selain itu juga untuk memenuhi amanat pengarusutamaan pembangunan yang inklusif dan beradilan bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia.

Penduduk usia 0–4 tahun sebesar 51.642. Kelompok ini menjadi target sasaran upaya penanganan stunting, imunisasi anak, dan gizi buruk. Kelompok usia 5-9 sebesar 60.098 jiwa sebagai target sasaran pendidikan PAUD. Kelompok 7-15 tahun sebesar kurang lebih 12,2 % penduduk sebagai kelompok sasaran pendidikan dasar 9 tahun. Kelompok usia 18 tahun ke bawah sebesar lebih dari 200.000 jiwa (26,3%) sebagai kelompok anak (menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Kelompok ini sasaran program perlindungan anak dan pembangunan Kabupaten Layak Anak. Kelompok usia 16-30 tahun sebagai kelompok pemuda (menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) sebanyak lebih dari 196.000 jiwa (21,5%) sebagai kelompok sasaran pembangunan wirausaha muda dan sumber daya inovasi. Kelompok ini sebagai kelompok prioritas untuk pengembangan kapasitas produktif dengan memanfaatkan internet maupun media sosial. Hal ini penting untuk menjaga resiliensi masyarakat dalam menghadapi tantangan pada tahun-tahun mendatang. Kelompok usia 60 tahun ke atas sebanyak 110.411 sebagai kelompok sasaran pembangunan lansia sehat dan mandiri. Kelompok usia produktif.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana di Indonesia diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial.

a. Bencana Alam

Pada Kabupaten Blora, bencana alam yang sering terjadi adalah longsor (gerakan tanah), banjir dan kekeringan. Bencana longsor merupakan konsekuensi dari bentangalam perbukitan dan pegunungan seperti yang dijelaskan dalam kondisi topografi di atas, dengan kemiringan lereng 16% hingga lebih dari 40% pada kurang lebih sepertiga wilayah kabupaten Blora. Sementara itu, banjir dan kekeringan merupakan konsekuensi dari formasi geologi Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Kapur. Seperti telah dibahas di atas, pegunungan kapur memiliki porositas tinggi yang tidak dapat menahan air. Oleh karena itu, pada musim penghujan, dataran rendah Kabupaten Blora, seperti Kecamatan Cepu, dan dataran yang berada pada cekungan, seperti Kecamatan Blora, menjadi kawasan yang rawan banjir. Sementara itu, pegunungan kapur juga tidak dapat menyimpan air dengan baik, sehingga pada bulan-bulan kering resiko kekeringan mengancam terutama pada Kecamatan-kecamatan yang berada jauh dari aliran sungai. Tabel I.7 di bawah ini menunjukkan jumlah dan lokasi bencana alam yang terjadi pada rentang waktu 2017-2021. Secara keruangan, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam relatif lebih tinggi dari kecamatan lain, yaitu Kecamatan Randublatung dengan total lebih dari 20 kejadian bencana dalam periode 2019-2021.

Tabel 1.7 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

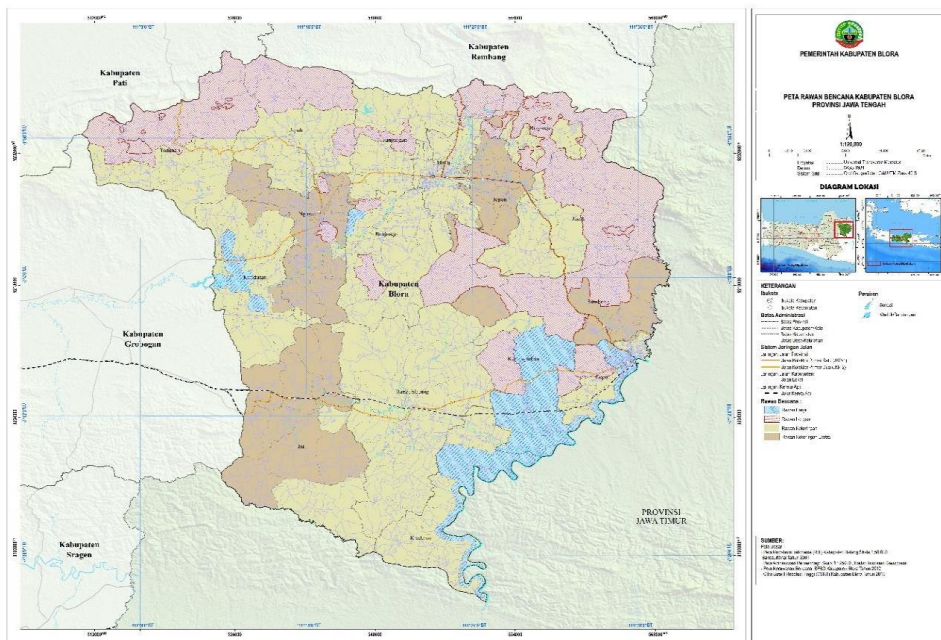
NO	BENCANA ALAM	LOKASI	JUMLAH KEJADIAN				
		(KECAMATAN)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Longsor	Jati	-	-	-	1	2
		Randublatung	-	-	6	6	3
		Kradenan	-	-	-	1	-
		Cepu	-	-	2	1	2
		Jiken	-	-	1	-	-
		Jepon	-	-	3	-	-
		Blora	-	-	1	2	1
		Banjarejo	-	-	-	-	1
		Japah	-	-	-	1	2
2	Banjir	Jati	-	-	-	1	1

NO	BENCANA ALAM	LOKASI	JUMLAH KEJADIAN				
		(KECAMATAN)	2017	2018	2019	2020	2021
		Randublatung	-	-	-	5	2
		Kedungtuban	-	-	2	1	5
		Cepu	-	-	1	3	4
		Sambong	-	-	-	-	3
		Jepon	-	-	2	-	1
		Ngawen	-	-	-	1	-
		Kunduran	-	-	-	1	-
3	Kekeringan	Jati	-	-	-	-	12
		Randublatung	-	-	-	-	10
		Kedungtuban	-	-	-	-	5
		Cepu	-	-	-	-	7
		Sambong	-	-	-	-	10
		Jiken	-	-	-	-	11
		Bogorejo	-	-	-	-	12
		Jepon	-	-	-	-	19
		Blora Kota	-	-	-	-	24
		Banjarejo	-	-	-	-	13
		Tunjungan	-	-	-	-	13
		Japah	-	-	-	-	11
		Ngawen	-	-	-	-	13
Kunduran	-	-	-	-	11		
4	Gempa	Randublatung	-	-	-	-	1
		Kunduran	-	-	-	-	20

Sumber: Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2022

Peta pada Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan sebaran area kerawanan bencana alam. Dengan demikian, kebutuhan mitigasi bencana untuk menghadapi bencana alam yang dapat diperkirakan seperti banjir dan kekeringan penting menjadi prioritas. Kabupaten Blora perlu mengembangkan aktivitas ekonomi dan pola layanan publik yang meningkatkan resiliensi masyarakat Kabupaten Blora untuk menghindari perburukan kondisi pembangunan yang telah ada.

Gambar 1.2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

b. Bencana Non Alam

Indonesia memasuki pandemi terhitung sejak Maret 2020 yang hingga tahun 2022 belum dinyatakan berakhir. Pada tahun 2023, masa pemulihan pasca pandemi dimulai. Kondisi ini perlu dijadikan pertimbangan untuk perencanaan tahun 2024 melalui strategi mitigasi bencana non-alam. Perencanaan pada tahun 2024 akan membutuhkan alokasi untuk mendorong peningkatan ekonomi dan penguatan kesiagaan untuk menghadapi dampak pandemi. Hal ini dilakukan dengan kebijakan pertahanan resiliensi ekonomi untuk menghindari dampak pelambatan ekonomi lebih lanjut akibat bencana non-alam COVID-19.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam memahami dinamika ekonomi wilayah Kabupaten Blora, pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan indikator produksi. Dengan menghitung kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu lima tahun, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora. Pertumbuhan ekonomi Blora dalam konstelasi regional disajikan pada tabel I.8 berikut ini.

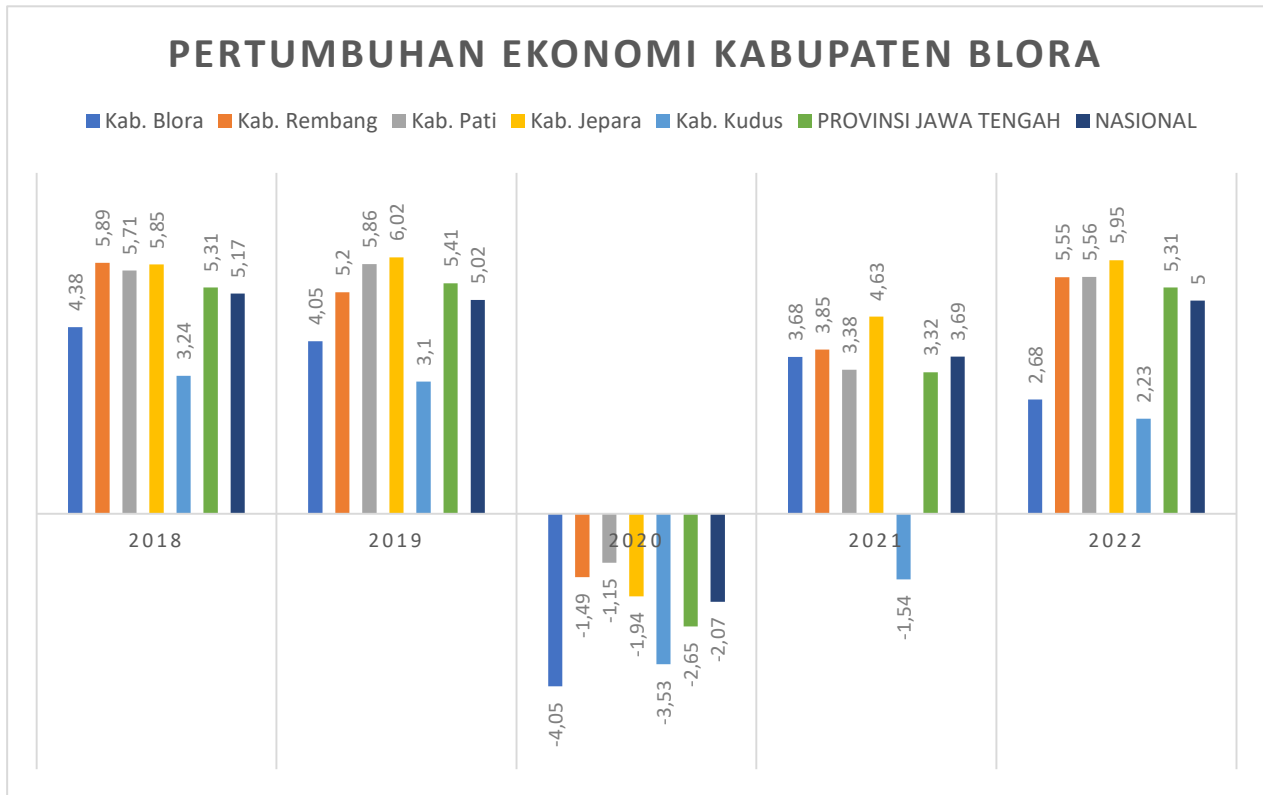
Tabel 1.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Blora	4,38	4,05	-4,56	3,68	2,68
Provinsi Jawa Tengah	5,31	5,41	-2,65	3,32	5,31
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31
Kabupaten Rembang	5,89	5,20	-1,49	3,85	5,55
Kabupaten Pati	5,71	5,86	-1,15	3,38	5,56
Kabupaten Jepara	5,85	6,02	-1,94	4,63	5,95
Kabupaten Kudus	3,24	3,10	-3,53	-1,54	2,23

Sumber: Blora Dalam Angka 2020-2022 diolah

Pada perspektif regional, Kabupaten Blora memiliki tingkat pertumbuhan yang masih dalam rerata perwilayahannya. Pada kurun waktu 2018–2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora masih di bawah rerata provinsi dan rerata nasional. Pada tahun 2021 mampu melampaui rerata provinsi (0,36 poin), namun masih 0,1 poin sedikit dibawah rerata nasional. Dibandingkan dengan daerah sekitar posisi Kabupaten Blora pada tahun 2021 unggul dibandingkan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Jepara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi melambat hingga di bawah rerata nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan tantangan besar untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi masih harus menjadi prioritas. Grafik pada Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Blora dan perbandingannya terhadap wilayah sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan rerata nasional.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Tahun 2018-2022



Dilihat dari capaian kinerja perbandingan target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 1.9 sebagai berikut.

Tabel 1.9 Perbandingan Target dan Kinerja Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

TAHUN	PERTUMBUHAN PDRB		STATUS PENCAPAIAN	TINGKAT PERTUMBUHAN
	TARGET	REALISASI		
2017	4,7-5,0	5,84	Tercapai	
2018	5,0-5,2	4,41	Tidak Tercapai	Turun 0,24
2019	5,0-5,3	4,05	Tidak Tercapai	Turun 0,08
2020	5,0-5,4	-4.56	Tidak Tercapai	Turun 2,12
2021	2-4	3,68	Tercapai	Naik 4,56

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2022

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2021 masih berada pada rentang target dengan sedikit di bawah target maksimum yang ditetapkan untuk tahun 2021. Upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu pengembangan ekonomi yang terdiversifikasi dan memiliki resiliensi terhadap krisis.

Penjelasan kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas akan disajikan besaran nilai PDRB dan kontribusi per sektor PDRB. Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut ini.

Tabel 1.10 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB (dalam juta rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.561.228	5.621.617,7	5.840.315,3	6.025.868,5	6.450.811,95
B	Pertambangan dan Penggalian	6.570.246	6.495.171,6	4.537.390,1	6.553.790,2	8.489.321,57
C	Industri Pengolahan	2.344.343	2.579.231,9	2.601.491,2	2.755.105,3	3.032.886,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.592	15.528,4	15.968,8	16.605,7	17.599,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.836	8.775,6	9.410,6	9.840,6	10.272,72
F	Konstruksi	988.961	1.094.411,2	1.027.340,4	1.167.743,6	1.353.189,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.607.295	4.029.490,9	3.914.254,1	4.165.784,5	4.512.922,25
H	Transportasi dan Pergudangan	594.832	660.278,1	537.932,9	569.691,6	918.815,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	755.331	867.545,3	850.276,0	926.366,1	1.111.376,07
J	Informasi dan Komunikasi	255.213	286.051,0	327.052,3	340.758,3	351.106,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	709.604	758.931,3	774.173,9	816.985,7	892.851,91
L	Real Estate	289.598	316.071,5	316.484,7	325.077,5	345.617,75
M,N	Jasa Perusahaan	71.849	82.220,6	78.966,3	82.727,9	91.792,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	752.829	791.999,2	790.569,5	769.995,1	808.495,23
P	Jasa Pendidikan	1.410.497	1.588.903,0	1.618.231,0	1.642.680,7	1.703.905,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.552	230.590,1	255.595,2	259.519,7	270.921,80
R,S, T,U	Jasa Lainnya	487.739	539.120,1	518.532,4	531.774,3	607.006,07
	PDRB DENGAN MIGAS	24.631.544	25.965.937,5	24.013.984,6	26.960.315,3	30.968.894,31
	PDRB TANPA MIGAS	18.061.298	19.886.074,7	19.905.864,1	20.857.611,2	22.969.352,77

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023

Selanjutnya data PDRB atas Dasar Harga Konstan disajikan dalam Tabel 1.11 di bawah ini:

Tabel 1.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHK (juta rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.678.040,05	3.647.233,40	3.715.465,36	3.801.475,87	3.902.609,60
B	Pertambangan dan Penggalian	4.699.700,50	4.681.810,94	4.075.073,66	4.291.884,25	3.954.421,79
C	Industri Pengolahan	1.547.113,38	1.665.269,21	1.634.464,41	1.684.015,37	1.762.069,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.284,06	13.058,68	13.534,05	14.183,07	14.923,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.750,21	7.408,50	7.585,30	7.847,80	8.081,66
F	Konstruksi	679.847,64	723.878,38	676.561,77	740.429,20	802.032,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.850.490,19	3.105.623,49	2.992.139,95	3.139.408,02	3.266.873,58
H	Transportasi dan Pergudangan	502.169,86	546.105,18	430.975,85	440.975,69	671.638,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	592.765,18	670.333,20	650.199,45	693.424,47	800.854,01
J	Informasi dan Komunikasi	269.047,61	2988.325,79	340.741,43	354.730,83	364.592,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	481.827,57	506.974,68	515.847,81	521.460,07	525.640,19
L	Real Estate	240.998,88	256.782,14	255.696,61	259.680,01	271.339,65
M,N	Jasa Perusahaan	51.277,99	56.796,62	53.715,20	55.470,13	58.914,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	522.926,21	542.904,87	535.406,46	526.490,87	537.863,08
P	Jasa Pendidikan	940.058,74	1.018.902,62	1.016.457,25	1.018.176,35	1.050.452,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153.270,91	163.717,25	177.505,85	178.184,26	183.155,60
R,S T,U	Jasa Lainnya	376.647,02	413.290,19	392.516,32	398.610,62	436.956,96

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHK (juta rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PDRB DENGAN MIGAS	17.605.216,00	18.318.415,14	17.483.886,74	18.126.446,9	18.612.419,28
	PDRB TANPA MIGAS		3.872.470,3	13.654.821,3	14.090.335,3	14.929.054,81

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023

Perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel II.17 berikut ini:

Tabel 1.12 Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,89	19,91	24,33	22,38	20,83
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	25,56	18,86	24,22	27,41
C	Industri Pengolahan	8,79	9,09	10,84	10,23	9,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	3,86	3,95	4,28	4,34	4,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,19	1,70	16,31	15,47	14,57
H	Transportasi dan Pergudangan	2,85	2,98	2,24	2,12	2,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	3,66	3,54	3,44	3,59
J	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,63	1,36	1,27	1,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	2,77	3,23	3,03	2,88
L	Real Estate	1,37	1,40	1,32	1,21	1,12
M, N	Jasa Perusahaan	0,29	0,31	0,33	0,31	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,97	2,96	3,29	2,86	2,61

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	5,34	5,56	6,74	6,10	5,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,89	1,06	0,96	0,87
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,14	2,26	2,16	1,97	1,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Blora 2022

Selama kurun 2018-2022, PDRB Kabupaten Blora mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Blora masih menunjukkan kontribusi besar dari empat sektor utama, yaitu Pertambangan (27,41%), Pertanian (20,83%), Perdagangan (14,57%) dan Industri Pengolahan (9,79%). Bila dibandingkan dengan kondisi dari tahun-tahun sebelumnya, data ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran struktur PDRB di Kabupaten Blora.

Melihat pada data di atas, Kabupaten Blora memiliki ketergantungan pada sektor pertambangan. Sektor pertambangan memiliki dampak terhadap lingkungan yang harus terus dimonitor untuk memastikan perkembangannya tidak merugikan sektor lain maupun mengancam keberlanjutan lingkungan di masa depan. Mengingat pertambangan juga termasuk produk yang tidak dapat diperbarui, diperlukan pengembangan sektor ekonomi lain yang dapat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sektor potensial pengembangan juga dapat dilihat melalui pertumbuhan kontribusi setiap sektor terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Blora. Hingga tahun 2022, ekonomi Kabupaten Blora masih berada pada sektor primer. Namun, pergerakan produktivitas sektor tersier seperti jasa, akomodasi dan makan minum, menunjukkan potensi pengembangan yang menjanjikan. Transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke tersier sejalan dengan kondisi global dimana digitalisasi ekonomi mengarah pada pengembangan sektor tersier dengan nilai tambah tinggi. Tabel di bawah ini memaparkan laju pertumbuhan sektoral dan total PDRB atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1.13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		LAJU PERTUMBUHAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	-0,84	1,87	2,31	2,66
B	Pertambangan dan	-1,31	-0,38	-12,96	5,32	-7,86

LAPANGAN USAHA		LAJU PERTUMBUHAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Penggalian					
C	Industri Pengolahan	7,27	7,64	-1,85	3,03	4,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	6,31	3,64	4,8	5,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,15	9,75	2,39	3,46	2,98
F	Konstruksi	5,69	6,48	-6,54	9,44	8,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	8,95	-3,65	4,92	4,06
H	Transportasi dan Pergudangan	7,43	8,75	-21,08	2,32	52,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,28	13,09	-3	6,65	15,49
J	Informasi dan Komunikasi	13,44	10,88	14,22	4,11	2,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,41	5,22	1,75	1,09	0,80
L	Real Estate	5,62	6,55	-0,42	1,56	4,49
M,N	Jasa Perusahaan	7,48	10,76	-5,43	3,27	6,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	3,82	-1,38	-1,67	2,16
P	Jasa Pendidikan	7,3	8,39	-0,24	0,17	3,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2	6,82	8,42	0,38	2,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,38	9,73	-5,03	1,55	9,62
	PDRB DENGAN MIGAS	4,38	4,05	-4,56	3,68	2,68
	PDRB TANPA MIGAS	6,65	5,73	-1,57	3,19	5,59

Sumber : BPS Kabupaten Blora 2023

Berdasarkan laju pertumbuhan, terlihat perekonomian Kabupaten Blora justru tumbuh lebih cepat tanpa kontribusi migas dalam periode 2021-2022. Sektor-sektor jasa menunjukkan tingkat pertumbuhan lebih baik dibandingkan sektor subsisten maupun sektor industri beriringan dengan pertumbuhan industri pengolahan.

Laju pertumbuhan tertinggi di sektor transportasi dan pergudangan (52,31%) diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (15,49) dimana keduanya secara konsisten menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi pasca COVID-19. Pencabutan status PPKM semakin memberikan ruang aktivitas masyarakat yang kembali pada kondisi normal sehingga pemanfaatan transportasi kembali meningkat. Kondisi yang sama dialami sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum, dengan aktivitas masyarakat yang kembali seperti sedia kala aktivitas pertemuan dan kebutuhan jasa makan minum pun turut pulih. Kemudahan transportasi dengan adanya penambahan jasa transportasi udara melalui Bandara Ngloram menjadi potensi dalam meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Blora sehingga mendorong pengembangan sarana transportasi lainnya serta sektor-sektor terkait seperti akomodasi dan makan minum.

Sektor pertanian masih menunjukkan laju pertumbuhan. Walaupun demikian, masih dibutuhkan intervensi teknik untuk menyelesaikan permasalahan pengairan. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan berkembang seiring meningkatnya aktivitas perkotaan setelah dibukanya bandara baru di Kabupaten Blora. Sektor perdagangan juga berpotensi untuk berkembang, terutama bila didukung oleh pengembangan sektor industri yang mengintegrasikan pertanian dalam proses produksinya. Dukungan *e-commerce* yang telah dimulai pada masa pandemi juga dapat menjadi sarana peningkatan sektor perdagangan melalui perluasan pasar produk.

2. PDRB Per Kapita

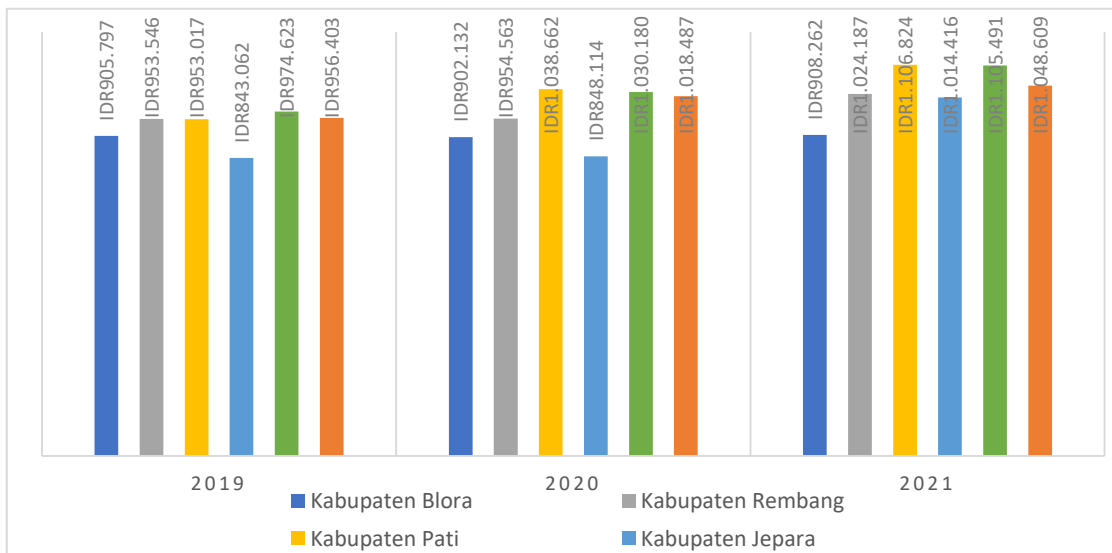
Produk Domestik Regional Bruto per kapita dipandang sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi yang lebih riil dalam menjelaskan kondisi wilayah karena menunjukkan rerata pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Blora dalam satu tahun. Deskripsi PDRB menurut pengeluaran untuk *proxy* pendapatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.14 PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran di Kabupaten Blora Tahun 2019-2022

WILAYAH	RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MAKANAN DAN BUKAN MAKANAN (RUPIAH)											
	MAKANAN				BUKAN MAKANAN				JUMLAH			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Tengah	469.421	496.173	519.009	572.808	486.982	522.314	529.600	548.986	956.403	1.018.487	1.048.609	1.121.794
Kabupaten Blora	455.161	467.340	500.984	562.948	450.636	434.792	407.278	450.251	905.797	902.132	908.262	1.013.199
Kabupaten Grobogan	419.534	451.270	440.938	534.845	327.383	376.907	378.747	421.084	746.917	828.177	819.685	955.929
Kabupaten Rembang	473.149	490.540	554.101	554.101	480.397	464.023	470.087	489.781	953.546	954.563	1.024.187	1.139.199
Kabupaten Pati	484.349	509.800	562.729	690.428	468.668	528.861	544.095	628.613	953.017	1.038.662	1.106.824	1.319.559
Kabupaten Kudus	453.093	491.693	523.244	589.877	521.530	538.487	582.247	630.529	974.623	1.030.180	1.105.491	1.220.405
Kabupaten Jepara	420.350	424.772	525.570	607.266	422.712	423.342	488.846	556.355	843.062	848.114	1.014.416	1.163.621
Kabupaten Demak	563.287	584.033	577.570	663.971	470.484	521.244	511.707	532.887	1.033.771	1.105.278	1.089.278	1.196.858

Sumber: Bappeda kabupaten Blora, 2022

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021



Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Blora masih di bawah rerata Provinsi Jawa Tengah, namun di atas Kabupaten Grobogan. Hal ini menandakan kemampuan ekonomi masyarakat Blora masih di bawah rerata wilayah sekitar. Kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah tercermin dari proporsi pengeluaran makan dan non makanan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi non pangan, Pengeluaran perkapita merupakan proksi yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak konsumsi yang dilakukan. Artinya, besarnya nilai pengeluaran menggambarkan daya beli penduduk kabupaten Blora terhadap harga-harga sejumlah komoditas pangan maupun bukan pangan.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur yaitu: (1) kondisi rumah tangga baik, apabila pengeluaran non pangan 50%; (2) kondisi sedang, jika pengeluaran non pangan di kisaran 20-49%; (3) kondisi buruk, jika pengeluaran non pangan kurang dari 20%.

Tingkat konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Blora sejak 2019 menunjukkan tren menurun di bawah 50%, namun masih di atas 40%. Pada tahun 2022, konsumsi non pangan membesar seiring membaiknya roda ekonomi pasca pandemi, namun belum lebih dari 50%. Dilihat dari proporsi pengeluaran non makanan yang semakin menurun, hal ini mengindikasikan adanya stagnasi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan pemanfaatan pendapatan masyarakat masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu bahan makanan. Dengan demikian kondisi rumah tangga rata-rata penduduk Kabupaten Blora termasuk kategori kesejahteraan menengah/sedang. Besarnya pengeluaran makanan, terutama pada kelompok pendapatan terendah, memberikan sinyal kerentanan masyarakat terhadap inflasi. Hal ini perlu diperhatikan dalam perencanaan pada tahun 2024 dengan mempersiapkan jaring pengaman berupa bantuan atau insentif terutama pada kebutuhan pokok.

3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu penanda stabilitas ekonomi pada skala wilayah. Tingkat inflasi yang stabil menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat yang akhirnya mendukung berjalannya pembangunan. Pada masyarakat dengan pendapatan rentan, inflasi merupakan pintu perburukan kondisi akibat kenaikan harga bahan pangan pokok serta kebutuhan pokok lain non-pangan seperti bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Tabel di bawah ini menunjukkan dinamika angka inflasi pada Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dari tahun 2018-2022.

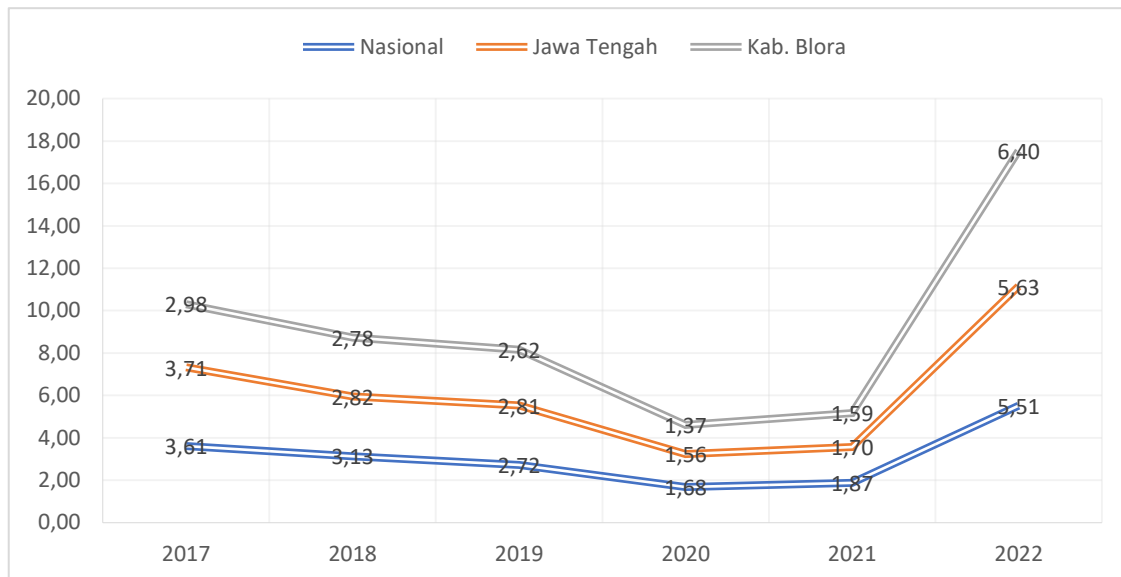
Tabel 1.15 Perbandingan Inflasi Kabupaten Blora dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

WILAYAH	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,7	5,63
Kab. Blora	2,78	2,62	1,37	1,59	6,40*

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2022.

*) Kudus (kota IHK)

Gambar 1.5 Laju Inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2017-2022



Inflasi di Kabupaten Blora dalam lima tahun terakhir secara umum telah menurun dari 2,98 pada tahun 2017 menjadi 1,59 pada tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi Provinsi Jawa Tengah (1,7 pada tahun 2021) dan angka inflasi nasional (1,87 pada tahun 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun, daya beli masyarakat Kabupaten Blora mampu bertahan stabil. Kondisi tahun 2022 jika mengacu pada inflasi Kudus menunjukkan angka 6.40.

Kondisi inflasi yang terlalu rendah sesungguhnya kurang baik bagi perkembangan ekonomi karena kurang merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi bahkan cenderung menunjukkan adanya kelesuan dalam perekonomian. Jika tingkat inflasi tahun 2022 pada angka yang tidak jauh dari Kudus maka ini menunjukkan adanya geliat ekonomi yang bagus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Blora.

4. Ketimpangan

Kesenjangan merupakan perbedaan mencolok dan signifikan. Kesenjangan dapat dihitung dari pendapatan atau PDRB perkapita pada kelompok-kelompok pendapatan, seperti menggunakan perhitungan indeks Gini. Bank Dunia menggunakan perhitungan 40-40-20 untuk membagi penduduk berdasarkan pengeluaran perkapita. Pengeluaran pada 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kesenjangan. Tabel di bawah menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Blora tahun 2018-2022.

Tabel 1.16 Distribusi Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2018- 2022

TAHUN	RATA-RATA PENGELUARAN						JUMLAH/ TOTAL
	40 PERSEN PENDUDUK BERPENDAPATAN RENDAH	%	40 PERSEN PENDUDUK BERPENDAPATAN MENENGAH	%	20 PERSEN PENDUDUK BERPENDAPATAN TINGGI	%	
2018	364.375	14,14	654.632	25,40	1.558.728	60,47	2.577.735
2019	425.962	13,04	826.575	25,30	2.014.718	61,66	3.267.255
2020	471.738	12,89	961.216	26,27	2.226.401	60,84	3.659.355
2021	480.743	12,66	963.717	25,37	2.354.156	61,97	3.798.616
2022	500.472	13,86	954.068	26,42	2.155.832	59,71	3.610.372

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022, diolah

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
- Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

Dari tabel di atas, nampak bahwa pada tahun 2020 dan 2021 pengeluaran 40% penduduk berpendapatan rendah berada pada angka di atas 12,89%. Hal ini berarti ketimpangan di Kabupaten Blora berada pada tingkat moderat/sedang/menengah.

5. Kemiskinan

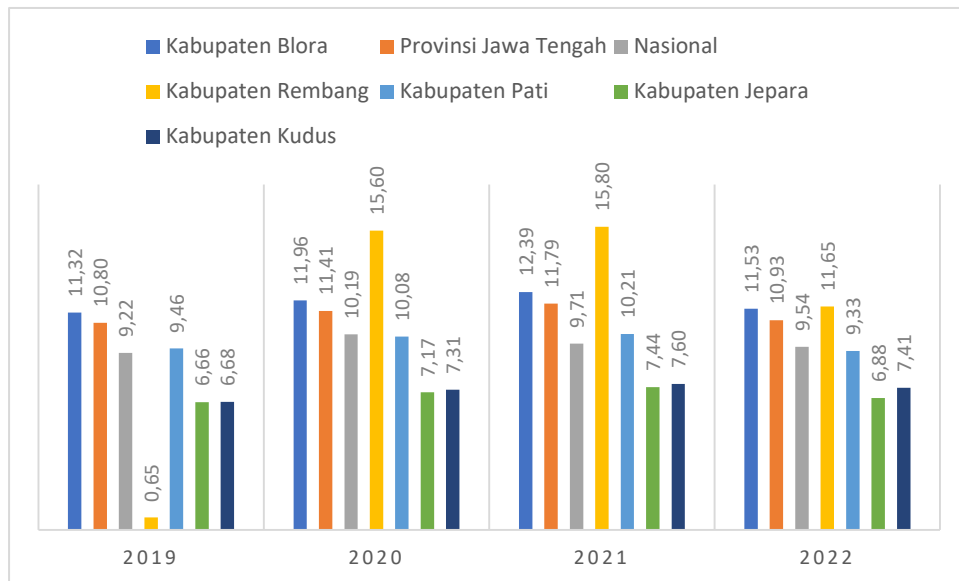
Pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora. Tabel II.23 menunjukkan dinamika persentase penduduk miskin pada tahun 2019-2022.

Tabel I.17 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019- 2022

Kabupaten/ Kota	Kemiskinan											
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)				Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				Persentase Penduduk Miskin (persen)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nasional	440.838	486.160	486.168	505.469	24.790	27.550	27.540	26.160	9,22	10,19	9,71	9,54
Jawa Tengah	369.385	395.407	409.193	438.833	3.743,23	3.980,9	4.109,75	3.831,44	10,80	11,41	11,79	10,93
Blora	335.837	353.259	363.649	390.478	97,90	103,70	107,10	99,83	11,32	11,96	12,39	11,53
Grobogan	375.521	395.001	404.456	428.597	161,90	172,30	175,70	163,20	11,77	12,46	12,74	11,80
Rembang	384.561	403.932	414.977	441.482	95.30	100,10	101,40	94,56	14,95	15,60	15,80	11,65
Pati	423.922	445.913	458.616	486.855	119	127,40	128,70	118,04	9,46	10,08	10,21	9,33
Kudus	406.470	429.666	450.992	482.806	58	64,20	67,10	66,06	6,68	7,31	7,60	7,41
Jepara	386.693	407.056	419.028	442.618	83,50	91,10	95,20	89,08	6,66	7,17	7,44	6,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Gambar 1.6 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora, Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022



Dalam tiga tahun terakhir terjadi sedikit perubahan prosentase kemiskinan. Pada tahun 2020, peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,61%. Peningkatan pada tahun 2021 sedikit lebih rendah dari tahun 2020, yaitu sebesar 0,38%. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Blora lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di Jawa Tengah maupun di Tingkat Nasional. Pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 11,53% lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun 2022 yaitu sebesar 12,39%.

Tingkat kemiskinan dikontribusikan oleh tingginya garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Blora sebenarnya paling rendah diantara daerah sekitar di Jawa Tengah. Hal ini senada dengan PDRB per kapita dari aspek pengeluaran, Kabupaten Blora terendah nomor 5 dari 6 daerah sekitar. Daya beli masyarakat di Blora relatif rendah. Data ini mengindikasikan kemiskinan di Blora disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan berkaitan dengan jenis pekerjaan dan posisi dalam pekerjaan. Posisi dalam pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal dan ketrampilan kerja sesuai kebutuhan pasar.

Fenomena kemiskinan tidak hanya dilihat dari banyaknya orang miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi seberapa besar usaha pemerintah mengangkat penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut ini disajikan data keparahan dan kedalaman kemiskinan di Blora dan perbandingan dengan daerah sekitar.

Tabel 1.18 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Blora dan Perbandingan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019- 2022

KABUPATEN/ KOTA	KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)				KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
NASIONAL	1,50	1,75	1,67	1,59	0,36	0,47	0,42	0,39
JAWA TENGAH	1,53	1,72	1,94	1,77	0,30	0,34	0,46	0,418
Blora	1,59	1,39	1,82	1,8	0,34	0,21	0,40	0,42
Grobogan	0,90	1,17	1,66	1,95	0,13	0,18	0,37	0,45
Rembang	2,32	2,44	2,77	2,41	0,48	0,53	0,68	0,59
Pati	1,47	1,37	1,69	1,20	0,31	0,26	0,42	0,25
Kudus	0,83	1,01	1,23	0,69	0,17	0,18	0,27	0,19
Jejara	0,64	0,60	0,88	1,22	0,10	0,07	0,17	0,30

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022

Kedalaman kemiskinan Kabupaten Blora menurun 0,02 poin dari tahun 2021, artinya jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan kian mendekati. Upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengentasan kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi penduduk miskin. Meski demikian, kedalaman kemiskinan Blora di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, keparahan kemiskinan Kabupaten Blora berada di bawah capaian di Provinsi Jawa Tengah. Hasil capaiannya pun menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2021 dari 0,40 menjadi 0,42. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Blora kian melebar. Diperlukan upaya untuk mendorong tumbuhnya iktikad berusaha bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraannya karena semakin tinggi ketimpangan berarti semakin rawan terjadinya gejolak sosial.

Oleh karena itu isu kemiskinan merupakan permasalahan multi dimensi, yang diupayakan penanggulangannya secara lintas sektor dan lintas pelaku. Pemerintah baik pusat dan daerah terus berusaha dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat guna penurunan kemiskinan melalui program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program padat karya, bedah rumah tidak layak huni, pemberdayaan pihak swasta dalam membantu penanggulangan kemiskinan baik melalui BAZNAS dan CSR perusahaan serta program 1 (satu) perangkat daerah mendampingi 5 (lima) warga miskin. Pada Tahun 2021 telah *launching* Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan pelaksanaan replikasi program satu perangkat daerah satu desa dampingan.

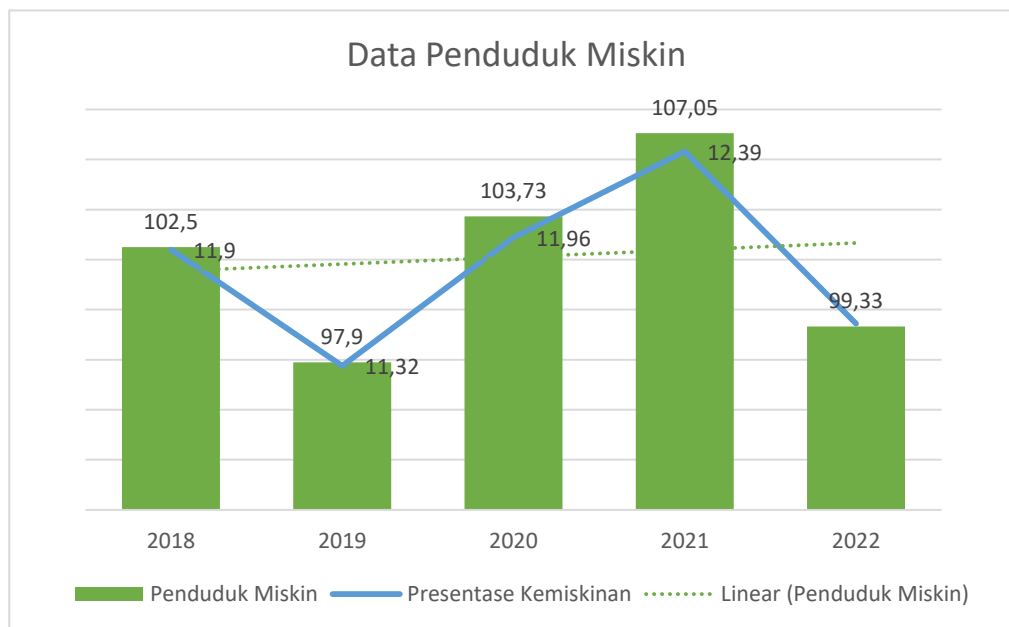
Penurunan kemiskinan ditargetkan sebagai prioritas utama RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026. Tabel II.25 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin dan presentase kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2018-2022.

Tabel 1.19 Data Penduduk Miskin Kabupaten Blora Tahun 2018-2022

NO.	TAHUN	PENDUDUK MISKIN (RIBU)	PERSENTASE KEMISKINAN
1	2018	102,5	11,90
2	2019	97,9	11,32
3	2020	103,73	11,96
4	2021	107,05	12,39
5	2022	99,33	11,53

Sumber: RPKD dan BPS, diolah

Gambar 1.7 Data Penduduk Miskin Kabupaten Blora Tahun 2018-2022



Tren kemiskinan di Kabupaten Blora menunjukkan kondisi positif karena mulai mendekati tren normal sebelum COVID-19. Tahun 2022 baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan kondisi tahun 2021. Langkah lebih lanjut yang perlu terus diupayakan adalah melihat lebih dalam lagi persebaran penduduk miskin di Kabupaten Blora guna memetakan intervensi prioritas pada lokasi tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran penduduk miskin di Kabupaten Blora menurut kecamatan.

Tabel 1.20 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blora Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PENDUDUK MISKIN	PERSENTASE
1	Jati	25.674	6,88
2	Randublatung	47.832	12,81
3	Kradenan	24.757	6,63
4	Kedungtuban	34.206	9,16
5	Cepu	19.887	5,33
6	Sambong	12.986	3,48
7	Jiken	18.679	5,00
8	Bogorejo	15.023	4,02
9	Jepon	22.633	6,06
10	Blora	17.600	4,71
11	Banjarejo	30.658	8,21
12	Tunjungan	15.430	4,13
13	Japah	12.886	3,45
14	Ngawen	22.925	6,14
15	Kunduran	25.259	6,76
16	Todanan	26.955	7,22
	Jumlah	373.390	100

Sumber: Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim diolah

Berdasarkan data-data di atas, kemiskinan tetap menjadi isu strategis untuk diintervensi dalam program pembangunan. Kondisi pandemi yang berdampak panjang terhadap pendapatan, inflasi, dan daya beli pada kelompok masyarakat berpendapatan 40% terendah. Perencanaan program yang berfungsi sebagai jaring pengaman penting untuk dilakukan secara berkesinambungan untuk membentuk resiliensi masyarakat dalam menghadapi krisis.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan

mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Blora yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota										
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Blora	22.267	18.282	82,10%	110.845	104.538	94,31%	2.758	2.758	100,00%	151.198.319.644	143.816.219.338

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kab/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Blora	11.333	11.333	100,00%	10.330	10.330	100,00%	10.326	10326	100,00%	54.930	54.877	99,90%	122.984	119.137	96,87%	608.277	608.277	100,00%	126.148	117.655	93,27%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
265.146	265.146	100,00%	11.567	11.567	100,00%	2.342	2.342	100,00%	9.947	8.166	82,10%	12.660	12.463	98,44%	2.102.149.000	1.293.873.495

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Blora	5.680	5.680	100,00%	1.832	1.832	100,00%	12.227.262.000	11.111.494.193

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Blora	26	26	100,00%	-	-	100,00%	135.000.000	135.000.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Blora	100	100	100,00%	911.248	911.248	100,00%	96267	96.267	100,00%	4.000	4.000	100,00%	132	70	53,03%	2.724.051.533	2.463.016.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Blora Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Blora	84	84	100,00%	20	20	100,00%	21	21	100,00%	19	19	100,00%	216	216	100,00%	280.609.000	280.609.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Blera ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Blera secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
- 2) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan, seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 3) Kurangnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Masyarakat dalam deteksi dini Kesehatan masih kurang (PTM).
- 2) Pemegang program SPM memegang tugas ganda, sehingga tidak bisa fokus di program yang menjadi tanggung jawabnya (PTM).
- 3) Pelaporan sering terlambat karena tugas ganda (PTM).
- 4) Keterlibatan Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Swasta yang masih belum Optimal dalam pelaporan penemuan kasus TB.
- 5) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi (Seperti ketersediaan *Catridge* yang terbatas).
- 6) Belum semua Petugas TBC terlatih TBC.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Blera secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi Anggaran yang terbatas
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat
- 3) Kurangnya personil bidang sehingga pengerjaan SPM terhambat

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Blora secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman dalam tata cara kesediaan anggaran.
- 2) Kurangnya pemahaman dalam perhitungan penerapan SPM.
- 3) Kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.
- 4) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan dan relokasi program pemerintah.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Blora secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia secara Kuantitas masih terbatas, jika dibandingkan dengan cakupan pelayanan yang dibutuhkan.
- 2) Ketersediaan Anggaran untuk program penanggulangan bencana masih kurang.
- 3) Wilayah pelayanan yang luas namun BPBD Kab Blora berada di tingkat eselon III yang membuat masih terbatasnya untuk dilaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
- 4) Kurangnya SDM bagi anggota yang berada di lapangan.
- 5) Keterbatasan anggota bagi penanggulangan kebakaran.
- 6) Sarana dan prasarana pada pemadam yang ada kualitasnya sudah menurun.
- 7) Perlu adanya peningkatan kapasitas.
- 8) Penambahan pos pemadam di wilayah kabupaten Blora agar wilayah pesisir Blora dapat di jangkau dengan lebih cepat lagi.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Blora berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya tenaga kesehatan dan psikolog/psikiater di Rumah Singgah.
- 2) Sarana dan Prasarana yang dimiliki di Rumah Singgah kurang memadai.
- 3) Kendaraan untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang dimiliki kurang layak.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Blora memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Blora Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		Pendidik dan tenaga kependidikan
		3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Guru
		4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		Kegiatan
		5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah		Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	
				2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
				3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
				4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
				2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
				2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Diabetes Melitus	
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Terpusat Skala Permukiman	
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN	
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	
		1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
		11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga Alam	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang		
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		Peralatan Proteksi Kebakaran		Kebakaran	
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Blora 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	18.282	16.394	16.394			1.096.531.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%				95,08	95,08	325.000.000	-	APBD/APBN	
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,39			82,66	82,66	771.531.000	-	APBD/APBN	
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	59,92			78,2	78,2	-	-		
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1,32			0,57	0,57	-	-		
e	Kecukupan formasi guru ASN	%	0,1			0,1	0,1	-	-		
f	Indeks Distribusi Guru	%	0,76			0,76	0,76	-	-		
g	Proporsi PTK bersertifikat	%	43,04			54,1	54,1	-	-		
h	Proporsi PTK penggerak	%	0,06			0,06	0,06	-	-		
i	Pengalaman pelatihan guru	%	1,38			0,22	0,22	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
2	Pendidikan Dasar	Orang	110.695	84.612	84.612			986.475.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	Orang	73.116	61.084	61.084			407.300.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%	106,26			102.06	102.06	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%	99,88			99.9	99.9	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%	95,44			93.18	93.18	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai	60,34			70.44	70.44	310.235.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai	34,19			54.81	54.81	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	6,46			5.86	5.86	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,93			2,56	2,56	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	67,16			69,73	69,73	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60,38			69,46	69,46	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	27,71			69	69	47.065.000	-	APBD/APBN	
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0.36	0.36	50.000.000	-	APBD/APBN	
1	Proporsi PTK bersertifikat	%	49,65			91.5	91.5	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
m	Proporsi PTK penggerak	%	-			0.13	0.13	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%	78,6			78,6	78,6	-	-		
	SMP	Orang	37.579	23.528	23.528			579.175.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%	98,25			100.78	100.78	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%	98,82			98.81	98.81	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%	70,87			74.24	74.24	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai	59,67			74.76	74.76	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai	54,29			52,79	52,79	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	7,52			7.31	7.31	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,17			2.58	2.58	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	0,28			0.5	0.5	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	0,64			0.22	0.22	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	17,74			40	40	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,51			0,33	0,33	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	71,78			94,7	94,7	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
m	Proporsi PTK penggerak	%	-			0.16	0.16	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%	21,23			86.7	86.7	-	-		
3	Pendidikan Kesetaraan		2.758	1.090	1.090			219.000.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%	91,06			92,06	92,06	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%	45,05			46,15	46,15	219.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%	45,85			46,85	46,85	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai	49,32			49,32	49,32	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai	45,74			45,74	45,74	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	8,24			8,24	8,24	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	5,04			5,04	5,04	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	67,31			67,31	67,31	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	65,57			65,57	65,57	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	-			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%	-			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	-			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%	-			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%	-			-	-	-	-		

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Blora 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	16.494	16.494			1.200.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%			95,60	95,60	375.000.000	-	APBD/APBN	
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			83,20	83,20	825.000.000	-	APBD/APBN	
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			-	-	-	-		
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			-	-	-	-		
e	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
f	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
g	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
h	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
i	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
2	Pendidikan Dasar	Orang	84.812	84.812			1.785.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	Orang	61.184	61.184			735.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Angka partisipasi kasar	%			-	-	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			-	-	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%			-	-	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			72,44	72,44	200.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			56,81	56,81	200.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			7,86	7,86	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			4,56	4,56	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			71,73	71,73	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			71,46	71,46	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			71	71	60.000.000	-	APBD/APBN	
k	Indeks Distribusi Guru	%			2,36	2,36	75.000.000	-	APBD/APBN	
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
	SMP	Orang	23.628	23.628			1.050.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Angka partisipasi kasar	%			100,00	100,00	200.000.000	-	APBD/APBN	
b	Angka partisipasi sekolah	%			100,00	100,00	200.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			100,00	100,00	200.000.000	-	APBD/APBN	
d	Kemampuan literasi	Nilai			77,24	77,24	200.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			54,79	54,79	50.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			9,31	9,31	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			4,58	4,58	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			2,50	2,50	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			2,22	2,22	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
3	Pendidikan Kesetaraan		1.000	1.000			219.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Angka partisipasi kasar	%			93,06	93,06	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			47,15	47,15	219.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			47,85	47,85	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			49,32	49,32	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai			45,74	45,74	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			8,24	8,24	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			5,04	5,04	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			67,31	67,31	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			65,57	65,57	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Blora 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	16.644	16.644			1.300.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%			96,10	96,10	425.000.000	-	APBD/APBN	
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			83,70	83,70	875.000.000	-	APBD/APBN	
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			-	-	-	-		
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			-	-	-	-		
e	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
f	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
g	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
h	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
i	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
2	Pendidikan Dasar	Orang	85.112	85.112			2.085.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	Orang	61.334	61.334			835.000.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
b	Angka partisipasi sekolah	%			-	-	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%			-	-	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			74,44	74,44	250.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			58,81	58,81	250.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			9,86	9,86	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			6,56	6,56	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			73,73	73,73	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			73,46	73,46	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			73	73	60.000.000	-	APBD/APBN	
k	Indeks Distribusi Guru	%			4	4	75.000.000	-	APBD/APBN	
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
	SMP	Orang	23.778	23.778			1.250.000.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
b	Angka partisipasi sekolah	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	
d	Kemampuan literasi	Nilai			79,24	79,24	250.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			56,79	56,79	50.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			11,31	11,31	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			6,58	6,58	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			4,50	4,50	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			4,22	4,22	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
3	Pendidikan Kesetaraan		1.000	1.000			219.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%			94,06	94,06	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
b	Angka partisipasi sekolah	%			48,15	48,15	219.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			48,85	48,85	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			49,32	49,32	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai			45,74	45,74	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			8,24	8,24	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			5,04	5,04	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			67,31	67,31	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			65,57	65,57	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Blora 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	16.794	16.794			1.400.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%			96,60	96,60	475.000.000	-	APBD/APBN	
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			84,20	84,20	925.000.000	-	APBD/APBN	
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			-	-	-	-		
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			-	-	-	-		
e	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
f	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
g	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
h	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
i	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
2	Pendidikan Dasar	Orang	85.412	85.412			2.115.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	Orang	61.484	61.484			865.000.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%			-	-	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			-	-	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%			-	-	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			76,44	76,44	250.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			60,81	60,81	250.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			11,86	11,86	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			8,56	8,56	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			75,73	75,73	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			75,46	75,46	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			75	75	75.000.000	-	APBD/APBN	
k	Indeks Distribusi Guru	%			6,36	6,36	90.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
	SMP	Orang	23.928	23.928			1.250.000.000	-	APBD/APBN	
a	Angka partisipasi kasar	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	
b	Angka partisipasi sekolah	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			100,00	100,00	250.000.000	-	APBD/APBN	
d	Kemampuan literasi	Nilai			82,24	82,24	250.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			58,79	58,79	50.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			12,31	12,31	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			7,58	7,58	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			5,50	5,50	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			5,22	5,22	50.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
3	Pendidikan Kesetaraan		1.000	1.000			219.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%			95,06	95,06	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			49,15	49,15	219.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			49,85	49,85	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			49,32	49,32	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai			45,74	45,74	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			8,24	8,24	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			5,04	5,04	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			67,31	67,31	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			65,57	65,57	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Blora 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	16.944	16.944			1.500.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%			91,10	91,10	525.000.000	-	APBD/APBN	
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			84,70	84,70	975.000.000	-	APBD/APBN	
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			-	-	-	-		
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			-	-	-	-		
e	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
f	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
g	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
h	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
i	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
2	Pendidikan Dasar	Orang	85.712	85.712			2.415.000.000	-	APBD/APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	Orang	61.634	61.634			965.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Angka partisipasi kasar	%			-	-	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			-	-	-	-		
c	Angka partisipasi murni	%			-	-	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			78,44	78,44	300.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			62,81	62,81	300.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			13,86	13,86	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			10,56	10,56	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			77,73	77,73	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			77,46	77,46	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			77	77	75.000.000	-	APBD/APBN	
k	Indeks Distribusi Guru	%			8,36	8,36	90.000.000	-	APBD/APBN	
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
	SMP	Orang	24.078	24.078			1.450.000.000	-	APBD/APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Angka partisipasi kasar	%			100,00	100,00	300.000.000	-	APBD/APBN	
b	Angka partisipasi sekolah	%			100,00	100,00	300.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			100,00	100,00	300.000.000	-	APBD/APBN	
d	Kemampuan literasi	Nilai			84,24	84,24	300.000.000	-	APBD/APBN	
e	Kemampuan numerasi	Nilai			60,79	60,79	50.000.000	-	APBD/APBN	
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			14,31	14,31	50.000.000	-	APBD/APBN	
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			9,58	9,58	50.000.000	-	APBD/APBN	
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			7,50	7,50	50.000.000	-	APBD/APBN	
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			7,22	7,22	50.000.000	-	APBD/APBN	
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		
3	Pendidikan Kesetaraan		1.000	1.000			219.000.000	-	APBD/APBN	DINAS

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
									PENDIDIKAN	
a	Angka partisipasi kasar	%			96,06	96,06	-	-		
b	Angka partisipasi sekolah	%			50,15	50,15	219.000.000	-	APBD/APBN	
c	Angka partisipasi murni	%			50,85	50,85	-	-		
d	Kemampuan literasi	Nilai			49,32	49,32	-	-		
e	Kemampuan numerasi	Nilai			45,74	45,74	-	-		
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			8,24	8,24	-	-		
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			5,04	5,04	-	-		
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			67,31	67,31	-	-		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			65,57	65,57	-	-		
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-	-		
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-	-		
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-	-		
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-	-		
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-	-		

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Blora 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	11.333	11.664	11.664			773.369.712	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	1.417			1.417	1.417	97.986.000	-	APBD	
b	Tablet tambah darah	<i>Tablet</i>	1.057.770			1.049.760	1.049.760	20.213.712	-	APBD	
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	<i>strip</i>	11.333			11.664	11.664	291.600.000	-	APBD	
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	<i>unit</i>	11.333			11.664	11.664	5.850.000	-	APBD	
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	<i>Unit</i>	11.333			11.664	11.664	7.800.000	-	APBD	
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	<i>Strip</i>	11.333			11.664	11.664	23.328.000	-	APBD	
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	11.333			11.664	11.664	34.992.000	-	APBD	
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	11.333			11.664	11.664	291.600.000	-	APBD	
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter	<i>Orang</i>	6			6	6	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	spesialis kebidanan										
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	822			822	822	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	52			52	52	-	-		
l.	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	-			10.624	10.624	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	10.330	11.664	11.664			384.912.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir	10.942			11.664	11.664	58.320.000	-	APBD	
b	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	10.942			11.664	11.664	34.992.000	-	APBD	
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.942			11.664	11.664	291.600.000	-	APBD	
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	6			6	6	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	822			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	52			52	52	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	10.326	10.604	10.604			833.198.696	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	276.488.696	-	APBD	
b	Vitamin K1 injeksi	<i>Ampul</i>	10.326			10.604	10.604	106.040.000	-	APBD	
c	Salep/tetes mata antibiotik	<i>Orang</i>	10.326			10.604	10.604	106.040.000	-	APBD	
d	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	10.326			10.604	10.604	53.020.000	-	APBD	
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	<i>Orang</i>	10.326			10.604	10.604	26.510.000	-	APBD	
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	10.326			10.604	10.604	265.100.000	-	APBD	
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	<i>Orang</i>	5			8	8	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	822			822	822	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	52			52	52	-	-		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	54.930	42.416	42.416			3.898.983.900	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau	<i>Buku</i>	54.930			42.416	42.416	1.060.400.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	instrumen standar lain yang berlaku										
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	<i>Formulir</i>	54.930			42.416	42.416	84.832.000	-	APBD	
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	54.930			42.416	42.416	1.060.400.000	-	APBD	
d	Vitamin A Biru	<i>Kapsul</i>	10.326			5.302	5.302	3.711.400	-	APBD	
e	Vitamin A Merah	<i>Kapsul</i>	44.604			42.416	42.416	29.691.200	-	APBD	
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	307.516.000	-	APBD	
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	103.929.000	-	APBD	
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	51.540.300	-	APBD	
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	46.662.000	-	APBD	
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	190.890.000	-	APBD	
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	180.200.000	-	APBD	
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	180.200.000	-	APBD	
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	190.890.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	-Hib										
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	180.200.000	-	APBD	
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	<i>Vaksin</i>	10.326			10.604	10.604	180.200.000	-	APBD	
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>buah</i>	10.326			10.604	10.604	31.812.000	-	APBD	
q	Peralatan Anafilaktik	<i>buah</i>	1.033			1.591	1.591	15.910.000	-	APBD	
r	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	822			8	8	-	-		
s	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	52			822	822	-	-		
t	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	52			52	52	-	-		
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>	26			44	44	-	-		
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	295			295	295	-	-		
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	<i>Orang</i>	295			295	295	-	-		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	122.984	111.904	111.904			7.217.808.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku raport kesehatanku	<i>Buku</i>	122.984			111.904	111.904	3.357.120.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
b	Buku pemantauan kesehatan	<i>Buku</i>	122.984			111.904	111.904	3.357.120.000	-	APBD	
c	Kuesioner skrining kesehatan	<i>Formulir</i>	122.984			111.904	111.904	167.856.000	-	APBD	
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	<i>Formulir</i>	122.984			111.904	111.904	167.856.000	-	APBD	
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	<i>Formulir</i>	122.984			111.904	111.904	167.856.000	-	APBD	
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	26			822	822	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	26			52	52	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>	26			44	44	-	-		
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	295			295	295	-	-		
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	<i>Orang</i>	295			295	295	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	608.277	586.394	586.394			929.110.500	-	APBD, DAK NON FISIK	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>	13.723			325	325	24.697.500	-	APBD	
b	Alat ukur berat badan	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
e	Alat : Tensimeter	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
f	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
g	Alat : Tes strip gula darah	<i>Unit</i>	608.277			218.450	218.450	703.409.000	-	DAK NON FISIK	
h	Alat : Lancet	<i>Unit</i>	52			218.450	218.450	174.880.000	-	DAK NON FISIK	
i	Alat : Kapas alkohol	<i>Unit</i>	608.362			218.450	218.450	26.124.000	-	DAK NON FISIK	
j	Alat : KIT IVA Tes	<i>Unit</i>	26			26	26	-	-		
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
l	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
m	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
n	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	<i>orang</i>	126.148	131.996	131.996			4.685.858.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	<i>orang</i>	126.148			131.996	131.996	461.986.000	-	APBD	
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	<i>orang</i>	126.148			131.996	131.996	263.992.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
c	Buku kesehatan lansia	<i>Buku</i>	126.148			131.996	131.996	3.959.880.000	-	APBD	
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	26			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	26			52	52	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>	26			44	44	-	-		
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	2			26	26	-	-		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<i>Orang</i>	265.146	263.452	263.452			676.904.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>	13.104			85	85	150.000.000	-		
b	Tensimeter	<i>Unit</i>	52			52	52	-	-		
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit	<i>Dokumen</i>	52			52	52	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	Tidak Menular (SIPTM)										
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	26			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	26			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	26			26	26	-	-		
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26	-	-		
h	Obat Hipertensi	Paket	-			263.452	263.452	526.904.000	-		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	11.567	11.763	11.763			13.598.666.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Alat : Glukometer	Unit	104.123			52	52	-	-		
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	104.123			11.763	11.763	42.120.000	-	APBD	
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	104.122			11.763	11.763	1.040.000	-	APBD	
d	Alat : Lancet	Unit	104.122			11.763	11.763	4.530.000	-	APBD	
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	11.567			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>	52			11.763	11.763	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	295			26	26	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
l	Obat Diabetes Melitus	<i>Paket</i>	-			11.763	11.763	13.550.976.000	-	APBD	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	<i>Orang</i>	2.342	2.280	2.280			226.605.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	<i>Buku</i>	52			52	52	-	-		
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	<i>Paket</i>	52			52	52	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Orang</i>	52			52	52	-	-		
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>	52			52	52	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	<i>Orang</i>	26			26	26	-	-		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<i>Orang</i>	9.947	9.441	9.441			2.682.967.536		APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	<i>Media</i>	9.947			9.441	9.441	65.685.000	-	APBD	
b	Reagen Zn TB	<i>Paket</i>	350			350	350	63.140.000	-	APBN	
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	<i>Paket</i>	1.197			1.810	1.810	31.062.000	-	APBN	
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi),	<i>Paket</i>	9.947			9.441	9.441	128.328.136	-	APBN	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	Rak pengering										
e	Catridge tes cepat molekuler	<i>Orang</i>	9.947			9.441	9.441	2.382.908.400	-	APBN	
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>	9.947			9.441	9.441	11.844.000	-	APBD	
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>	32			32	32	-	-		
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	<i>Orang</i>	6			6	6	-	-		
l	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	78			78	78	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<i>Orang</i>	12.660	13.035	13.035			547.406.150	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	<i>Media</i>	12.660			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	<i>Paket</i>	12.660			13.035	13.035	236.000.000	-	APBD	
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>	12.660			13.035	13.035	181.056.150	-	APBD	
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>	12.660			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR 2022	PENCAPAIAN SPM (2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
i	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>	32			32	32	-	-		

Tabel 3.7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Blora 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER	INSTANSI
----	-----------------------------------	--------	-----------------------	--	--	--	--	----------	--------	----------

	SPM								PENDANAAN	PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	12.247	12.247			851.887.190	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			1.531	1.531	108.000.900	-		
b	Tablet tambah darah	Tablet			1.102.248	1.102.248	22.289.540	-		
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	strip			12.247	12.247	321.483.750	-		
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	unit			12.247	12.247	6.142.500	-		
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit			12.247	12.247	8.190.000	-		
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip			12.247	12.247	25.718.700	-		
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			12.247	12.247	38.578.050	-		
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.247	12.247	321.483.750	-		
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang			6	6	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
l	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua,	Orang			11.155	11.155	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Dua kali pada trimester ketiga)									
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	12.247	12.247			424.358.550	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			12.247	12.247	64.296.750	-		
b	Kartu ibu (rekam medis)	Paket			12.247	12.247	38.578.050	-		
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.247	12.247	321.483.750	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang			6	6	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	11.134	11.134			918.588.402	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			11.134	11.134	304.826.652	-		
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul			11.134	11.134	116.907.000	-		
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			11.134	11.134	116.907.000	-		
d	Formulir bayi baru lahir	Formulir			11.134	11.134	58.453.500	-		
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			11.134	11.134	29.226.750	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>			11.134	11.134	292.267.500	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	<i>Orang</i>			8	8	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	44.357	44.357			4.288.928.805	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Buku</i>			44.357	44.357	1.164.371.250	-		
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	<i>Formulir</i>			44.357	44.357	93.149.700	-		
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>			44.357	44.357	1.164.371.250	-		
d	Vitamin A Biru	<i>Kapsul</i>			5.567	5.567	4.091.745	-		
e	Vitamin A Merah	<i>Kapsul</i>			44.357	44.357	32.602.395	-		
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	339.030.300	-		
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	114.568.860	-		
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	56.821.905	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	51.443.700	-		
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	210.451.500	-		
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	198.741.900	-		
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	198.741.900	-		
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	210.451.500	-		
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	198.741.900	-		
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	<i>Vaksin</i>			11.134	11.134	198.741.900	-		
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>buah</i>			11.134	11.134	35.072.100	-		
q	Peralatan Anafilaktik	<i>buah</i>			1.670	1.670	17.535.000	-		
r	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			8	8	-	-		
s	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
t	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	<i>Orang</i>			295	295	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	117.449	117.449			7.954.233.525	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku raport kesehatanku	<i>Buku</i>			117.449	117.449	3.699.643.500	-		
b	Buku pemantauan kesehatan	<i>Buku</i>			117.449	117.449	3.699.643.500	-		
c	Kuesioner skrining kesehatan	<i>Formulir</i>			117.449	117.449	184.982.175	-		
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	<i>Formulir</i>			117.449	117.449	184.982.175	-		
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	<i>Formulir</i>			117.449	117.449	184.982.175	-		
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	<i>Orang</i>			295	295	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	593.421	593.421			1.688.474.050	-	APBD, DAK	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>			360	360	30.000.000	-	APBD	
b	Alat ukur berat badan	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
e	Alat : Tensimeter	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
f	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
g	Alat : Tes strip gula darah	<i>Unit</i>			383.100	383.100	1.340.850.000	-	DAK	
h	Alat : Lancet	<i>Unit</i>			383.100	383.100	240.904.050	-	DAK	
i	Alat : Kapas alkohol	<i>Unit</i>			383.100	383.100	76.720.000	-	DAK	
j	Alat : KIT IVA Tes	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
l	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
m	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			-	-	-	-		
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			-	-	-	-		
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			-	-	-	-		
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			-	-	-	-		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	138.596	138.596			5.166.165.900	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	orang			138.596	138.596	509.340.300	-		
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	orang			138.596	138.596	291.051.600	-		
c	Buku kesehatan lansia	Buku			138.596	138.596	4.365.774.000	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			26	26	-	-		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	276.452	276.452			675.904.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			123	123	123.000.000	-		
b	Tensimeter	Unit			52	52	-	-		
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			52	52	-	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
h	Obat Hipertensi	Paket			276.452	276.452	552.904.000	-		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	12.763	12.763			14.863.789.800	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Alat : Glukometer	Unit			-	-	80.406.900	-		
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			12.763	12.763	57.433.500	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit			12.763	12.763	12.763.000	-		
d	Alat : Lancet	Unit			12.763	12.763	10.210.400	-		
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			-	-	-	-		
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			-	-	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			26	26	-	-		
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
l	Obat Diabetes Melitus	Paket			12.763	12.763	14.702.976.000	-		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	2.280	2.280			46.800.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku			52	52	10.400.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	<i>Paket</i>			52	52	26.000.000	-		
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>			52	52	10.400.000	-		
e	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	9.427	9.427			2.679.204.072	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	<i>Media</i>			9.526	9.526	65.615.000	-		
b	Reagen Zn TB	<i>Paket</i>			350	350	63.140.000	-		
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	<i>Paket</i>			1.808	1.808	31.062.000	-		
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	<i>Paket</i>			16.411	16.411	128.174.272	-		
e	Catridge tes cepat molekuler	<i>Orang</i>			9.427	9.427	2.379.374.800	-		
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>			1.812	1.812	11.838.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>			33	33	-	-		
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	<i>Orang</i>			6	6	-	-		
l	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			78	78	-	-		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	13.035	13.035			547.406.150	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	<i>Media</i>			13.035	13.035	65.175.000	-		
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	<i>Paket</i>			13.035	13.035	236.000.000	-		
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>			13.035	13.035	181.056.150	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>			13.035	13.035	65.175.000	-		
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
i	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			32	32	-	-		

Tabel 3.8 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Blora 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
----	---------------------------------------	--------	-----------------------	--	--	--	--	----------	------------------	--------------------

			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	12.860	12.860			938.538.598	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			1.608	1.608	119.096.460	-		
b	Tablet tambah darah	Tablet			1.157.360	1.157.360	24.575.460	-		
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	strip			12.860	12.860	354.460.180	-		
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	unit			12.860	12.860	6.449.638	-		
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit			12.860	12.860	8.599.500	-		
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip			12.860	12.860	28.356.300	-		
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			12.860	12.860	42.540.880	-		
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.860	12.860	354.460.180	-		
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang			6	6	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
l	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang			11.713	11.713	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	12.860	12.860			467.898.240	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	Formulir			12.860	12.860	70.897.180	-		
b	Kartu ibu (rekam medis)	Paket			12.860	12.860	42.540.880	-		
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.860	12.860	354.460.180	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang			6	6	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	11.691	11.691			1.012.790.664	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			11.691	11.691	336.081.177	-		
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul			11.691	11.691	128.904.300	-		
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			11.691	11.691	128.893.275	-		
d	Formulir bayi baru lahir	Formulir			11.691	11.691	64.452.483	-		
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			11.691	11.691	32.220.396	-		
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			11.691	11.691	322.239.033	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang			8	8	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	46.764	46.764			4.739.695.547	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku			46.764	46.764	1.288.956.132	-		
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			46.764	46.764	103.114.620	-		
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku			46.764	46.764	1.288.956.132	-		
d	Vitamin A Biru	Kapsul			5.845	5.845	4.512.340	-		
e	Vitamin A Merah	Kapsul			46.764	46.764	36.101.808	-		
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin			11.691	11.691	373.796.343	-		
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			11.691	11.691	126.525.546	-		
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin			11.691	11.691	62.637.358	-		
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			11.691	11.691	56.708.190	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	231.988.050	-		
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	219.099.825	-		
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	219.099.825	-		
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	231.988.050	-		
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	219.099.825	-		
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	<i>Vaksin</i>			11.691	11.691	219.099.825	-		
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>buah</i>			11.691	11.691	38.673.828	-		
q	Peralatan Anafilaktik	<i>buah</i>			1.754	1.754	19.337.850	-		
r	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			8	8	-	-		
s	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
t	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	<i>Orang</i>			295	295	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	123.374	123.374			8.773.371.888	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku raport kesehatanku	<i>Buku</i>			123.374	123.374	4.080.595.050	-		
b	Buku pemantauan kesehatan	<i>Buku</i>			123.374	123.374	4.080.595.050	-		
c	Kuesioner skrining kesehatan	<i>Formulir</i>			123.374	123.374	204.060.596	-		
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	<i>Formulir</i>			123.374	123.374	204.060.596	-		
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	<i>Formulir</i>			123.374	123.374	204.060.596	-		
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	<i>Orang</i>			295	295	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	596.731	596.731			3.880.886.000	-	APBD, DAK	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>			230	230	-	-		
b	Alat ukur berat badan	<i>Unit</i>			100	100	-	-		
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	<i>Unit</i>			100	100	-	-		
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	<i>Unit</i>			100	100	-	-		
e	Alat : Tensimeter	<i>Unit</i>			100	100	200.000.000	-	APBD	
f	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>			300	300	90.000.000	-	APBD	
g	Alat : Tes strip gula darah	<i>Unit</i>			596.731	596.731	2.685.289.500	-	DAK	
h	Alat : Lancet	<i>Unit</i>			596.731	596.731	596.731.000	-	DAK	
i	Alat : Kapas alkohol	<i>Unit</i>			596.731	596.731	298.365.500	-	DAK	
j	Alat : KIT IVA Tes	<i>Unit</i>			1	1	10.500.000	-	APBD	
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
l	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
m	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			26	26	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
n	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	145.526	145.526			5.695.742.114	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	<i>orang</i>			145.526	145.526	561.584.834	-		
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	<i>orang</i>			145.526	145.526	320.884.830	-		
c	Buku kesehatan lansia	<i>Buku</i>			145.526	145.526	4.813.272.450	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			26	26	-	-		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	279.452	279.452			613.904.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			250	250	25.000.000	-		
b	Tensimeter	Unit			10	10	30.000.000	-		
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			-	-	-	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
h	Obat Hipertensi	Paket			279.452	279.452	558.904.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	13.763	13.763			221.706.900	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Alat : Glukometer	Unit			450	450	135.000.000	-		
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			13.763	13.763	61.933.500	-		
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit			13.763	13.763	13.763.000	-		
d	Alat : Lancet	Unit			13.763	13.763	11.010.400	-		
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			-	-	-	-		
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			-	-	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			26	26	-	-		
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
l	Obat Diabetes Melitus	Paket			13.763	13.763	15.854.976.000	-		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Orang	2.310	2.310			52.500.000	-	APBD	DINAS

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat								KESEHATAN	
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	<i>Buku</i>			-	-	-	-		
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	<i>Paket</i>			-	-	-	-		
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Orang</i>			200	200	30.000.000	-		
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>			150	150	22.500.000	-		
e	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	9.427	9.427			2.679.204.072	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	<i>Media</i>			9.526	9.526	65.615.000	-		
b	Reagen Zn TB	<i>Paket</i>			350	350	63.140.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	<i>Paket</i>			1.808	1.808	31.062.000	-		
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	<i>Paket</i>			16.411	16.411	128.174.272	-		
e	Catridge tes cepat molekuler	<i>Orang</i>			9.427	9.427	2.379.374.800	-		
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>			1.812	1.812	11.838.000	-		
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>			33	33	-	-		
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	<i>Orang</i>			6	6	-	-		
l	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			78	78	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<i>Orang</i>	13.035	13.035			547.406.150	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	<i>Media</i>			13.035	13.035	65.175.000	-		
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	<i>Paket</i>			13.035	13.035	236.000.000	-		
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>			13.035	13.035	181.056.150	-		
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>			13.035	13.035	65.175.000	-		
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>			32	32	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			32	32	-	-		

Tabel 3.9 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Blora 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			

	Kabupaten/Kota									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	13.503	13.503			1.033.960.755	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>			1.688	1.688	131.322.620	-		
b	Tablet tambah darah	<i>Tablet</i>			1.215.528	1.215.528	27.100.521	-		
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	<i>strip</i>			13.503	13.503	390.790.323	-		
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	<i>unit</i>			13.503	13.503	6.772.116	-		
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	<i>Unit</i>			13.503	13.503	9.029.488	-		
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	<i>Strip</i>			13.503	13.503	31.259.445	-		
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>			13.503	13.503	46.895.919	-		
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>			13.503	13.503	390.790.323	-		
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	<i>Orang</i>			6	6	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
l	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>			12.999	12.999	-	-		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	13.503	13.503			515.855.109	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Formulir Partograf	<i>Formulir</i>			13.503	13.503	78.168.867	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)				INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI			
	Kabupaten/Kota								
b	Kartu ibu (rekam medis)	<i>Paket</i>			13.503	13.503	46.895.919	-	
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>			13.503	13.503	390.790.323	-	
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	<i>Orang</i>			6	6	-	-	
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-	
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	12.275	12.275			1.116.551.714	-	APBN, APBD
a	Vaksin Hepatitis B0	<i>Vaksin</i>			12.275	12.275	370.508.600	-	
b	Vitamin K1 injeksi	<i>Ampul</i>			12.275	12.275	142.113.114	-	
c	Salep/tetes mata antibiotik	<i>Orang</i>			12.275	12.275	142.095.400	-	
d	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>			12.275	12.275	71.059.975	-	
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	<i>Orang</i>			12.275	12.275	35.523.850	-	
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>			12.275	12.275	355.250.775	-	
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	<i>Orang</i>			8	8	-	-	
h	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	49.102	49.102			5.225.932.747	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku			49.102	49.102	1.421.060.982	-		
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			49.102	49.102	113.671.130	-		
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku			49.102	49.102	1.421.060.982	-		
d	Vitamin A Biru	Kapsul			6.138	6.138	4.977.918	-		
e	Vitamin A Merah	Kapsul			49.102	49.102	39.821.722	-		
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin			12.275	12.275	412.096.300	-		
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			12.275	12.275	139.500.465	-		
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin			12.275	12.275	69.061.605	-		
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			12.275	12.275	62.523.940	-		
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			12.275	12.275	255.776.630	-		
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin			12.275	12.275	241.665.488	-		
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin			12.275	12.275	241.665.488	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	<i>Vaksin</i>			12.275	12.275	255.776.630	-		
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	<i>Vaksin</i>			12.275	12.275	241.665.488	-		
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	<i>Vaksin</i>			12.275	12.275	241.665.488	-		
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	<i>buah</i>			12.275	12.275	42.631.075	-		
q	Peralatan Anafilaktik	<i>buah</i>			1.841	1.841	21.311.416	-		
r	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			8	8	-	-		
s	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
t	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	129.534	129.534			9.672.174.246	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku raport kesehatanku	<i>Buku</i>			129.534	129.534	4.498.586.286	-		
b	Buku pemantauan kesehatan	<i>Buku</i>			129.534	129.534	4.498.586.286	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)				INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI				ANGGARAN
	Kabupaten/Kota									
c	Kuesioner skrining kesehatan	Formulir			129.534	129.534	225.000.558	-		
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir			129.534	129.534	225.000.558	-		
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir			129.534	129.534	225.000.558	-		
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			295	295	-	-		
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang			295	295	-	-		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	601.731	601.731			3.815.905.300	-	APBD, DAK	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			250	250	25.000.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
b	Alat ukur berat badan	Unit			-	-	-	-		
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit			-	-	-	-		
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit			-	-	-	-		
e	Alat : Tensimeter	Unit			-	-	-	-		
f	Alat : Glukometer	Unit			-	-	-	-		
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit			601.731	601.731	2.707.789.500	-	DAK	
h	Alat : Lancet	Unit			601.731	601.731	601.731.000	-	DAK	
i	Alat : Kapas alkohol	Unit			601.731	601.731	481.384.800	-	DAK	
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit			-	-	-	-		
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			-	-	-	-		
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			26	26	-	-		
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			-	-	-	-		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	152.802	152.802			6.279.550.992	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	orang			152.802	152.802	619.153.704	-		
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	orang			152.802	152.802	353.736.630	-		
c	Buku kesehatan lansia	Buku			152.802	152.802	5.306.660.658	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			26	26	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	281.452	281.452			607.904.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>			300	300	30.000.000	-	APBD	
b	Tensimeter	<i>Unit</i>			5	5	15.000.000	-	APBD	
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Dokumen</i>			-	-	-	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
h	Obat Hipertensi	<i>Paket</i>			281.452	281.452	607.904.000	-		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14.263	14.263			16.520.832.900	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	<i>Unit</i>			14.263	14.263	64.183.500	-	APBD	
c	Alat : Kapas Alkohol	<i>Unit</i>			14.263	14.263	14.263.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
d	Alat : Lancet	Unit			14.263	14.263	11.410.400	-	APBD	
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			-	-	-	-		
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			-	-	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26		-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26		-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26		-		
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			26	26		-		
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26		-		
l	Obat Diabetes Melitus	Paket			14.263	14.263	16.430.976.000	-		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	2.350	2.350			58.500.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku			30	30	6.000.000	-	APBD	
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang			200	200	30.000.000	-	APBD	
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			150	150	22.500.000	-	APBD	
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			26	26	-	-		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	9.427	9.427			2.679.204.072	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			9.526	9.526	65.615.000	-	APBD	
b	Reagen Zn TB	Paket			350	350	63.140.000	-	APBD	
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket			1.808	1.808	31.062.000	-	APBD	
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			16.411	16.411	128.174.272	-	APBD	
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang			9.427	9.427	2.379.374.800	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>			1.812	1.812	11.838.000	-	APBD	
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>			33	33	-	-		
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	<i>Orang</i>			6	6	-	-		
l	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			33	33	-	-		
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			78	78	-	-		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	13.035	13.035			547.406.150	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	<i>Media</i>			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	<i>Paket</i>			13.035	13.035	236.000.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2026)				INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI				ANGGARAN
	Kabupaten/Kota									
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	<i>Paket</i>			13.035	13.035	181.056.150	-	APBD	
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	<i>Paket</i>			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
i	Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>			32	32	-	-		
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			32	32	-	-		

Tabel 3.10 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Blora 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	14.178	14.178			1.139.080.940	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			1.773	1.773	144.760.216	-		
b	Tablet tambah darah	Tablet			1.275.990	1.275.990	29.873.046	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	strip			14.178	14.178	430.841.064	-		
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	unit			14.178	14.178	7.110.714	-		
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Unit			14.178	14.178	9.480.952	-		
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Strip			14.178	14.178	34.466.718	-		
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket			14.178	14.178	51.707.166	-		
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			14.178	14.178	430.841.064	-		
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang			6	6	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
1	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang			12.914	12.914	-	-		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14.178	14.178			569.104.920	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
a	Formulir Partograf	Formulir			14.178	14.178	86.173.884	-		
b	Kartu ibu (rekam medis)	Paket			14.178	14.178	52.089.972	-		
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			14.178	14.178	430.841.064	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang			6	6	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	12.889	12.889			1.231.021.212	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			12.889	12.889	408.491.077	-		
b	Vitamin K1 injeksi	Ampul			12.889	12.889	156.684.395	-		
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			12.889	12.889	156.665.795	-		
d	Formulir bayi baru lahir	Formulir			12.889	12.889	78.339.342	-		
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			12.889	12.889	39.169.671	-		
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku			12.889	12.889	391.670.932	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang			8	8	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	51.557	51.557			5.761.403.675	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Buku			51.557	51.557	1.566.714.116	-		
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			51.557	51.557	125.335.067	-		
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku			51.557	51.557	1.566.714.116	-		
d	Vitamin A Biru	Kapsul			6.445	6.445	5.491.140	-		
e	Vitamin A Merah	Kapsul			51.557	51.557	43.926.564	-		
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin			12.889	12.889	454.350.139	-		
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			12.889	12.889	153.827.637	-		
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin			12.889	12.889	76.148.964	-		
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			12.889	12.889	68.938.298	-		
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin			12.889	12.889	282.020.310	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin			12.889	12.889	266.353.804	-		
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin			12.889	12.889	266.353.804	-		
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	Vaksin			12.889	12.889	282.020.310	-		
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin			12.889	12.889	266.353.804	-		
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin			12.889	12.889	266.353.804	-		
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	buah			12.889	12.889	47.006.183	-		
q	Peralatan Anafilaktik	buah			1.933	1.933	23.495.615	-		
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			8	8	-	-		
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			295	295	-	-		
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang			295	295	-	-		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	136.020	136.020			10.664.240.040	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Buku raport kesehatanku	<i>Buku</i>			136.020	136.020	4.959.969.300	-		
b	Buku pemantauan kesehatan	<i>Buku</i>			136.020	136.020	4.959.969.300	-		
c	Kuesioner skrining kesehatan	<i>Formulir</i>			136.020	136.020	248.100.480	-		
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	<i>Formulir</i>			136.020	136.020	248.100.480	-		
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	<i>Formulir</i>			136.020	136.020	248.100.480	-		
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			822	822	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>			52	52	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	<i>Orang</i>			44	44	-	-		
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	<i>Orang</i>			295	295	-	-		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia	Orang	605.731	605.731			3.841.105.300	-	APBD, DAK	DINAS

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Produktif									KESEHATAN
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>			250	250	25.000.000	-	APBD	
b	Alat ukur berat badan	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
e	Alat : Tensimeter	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
f	Alat : Glukometer	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
g	Alat : Tes strip gula darah	<i>Unit</i>			605.731	605.731	2.725.789.500	-	DAK	
h	Alat : Lancet	<i>Unit</i>			605.731	605.731	605.731.000	-	DAK	
i	Alat : Kapas alkohol	<i>Unit</i>			605.731	605.731	484.584.800	-	DAK	
j	Alat : KIT IVA Tes	<i>Unit</i>			-	-	-	-		
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
l	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			-	-	-	-		
m	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>			-	-	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			-	-	-	-		
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			-	-	-	-		
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			-	-	-	-		
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			-	-	-	-		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	160.442	160.442			6.923.232.742	-	APBN, APBD	DINAS KESEHATAN
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	orang			160.442	160.442	682.680.710	-		
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	orang			160.442	160.442	390.034.502	-		
c	Buku kesehatan lansia	Buku			160.442	160.442	5.850.517.530	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			822	822	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			52	52	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			44	44	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			26	26	-	-		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	283.452	283.452			586.104.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			200	200	20.000.000	-	APBD	
b	Tensimeter	Unit			-	-	-	-		
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			-	-	-	-		
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			-	-	-	-		
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			-	-	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			-	-	-	-		
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			-	-	-	-		
h	Obat Hipertensi	Paket			283.452	283.452	566.104.000	-		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14.263	14.263			16.520.832.900	-	APBD	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
a	Alat : Glukometer	Unit			-	-	-	-		
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			14.263	14.263	64.183.500	-	APBD	
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit			14.263	14.263	14.263.000	-	APBD	
d	Alat : Lancet	Unit			14.263	14.263	11.410.400	-	APBD	
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			-	-	-	-		
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			-	-	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			26	26	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			26	26	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			26	26	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			26	26	-	-		
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			26	26	-	-		
l	Obat Diabetes Melitus	Paket			14.263	14.263	16.430.976.000	-		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	2.380	2.380			57.000.000	-	APBD	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	<i>Buku</i>			30	30	4.500.000	-	APBD	
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	<i>Paket</i>			-	-	-	-		
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Orang</i>			200	200	30.000.000	-	APBD	
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>			150	150	22.500.000	-	APBD	
e	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	<i>Orang</i>			26	26	-	-		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	9.427	9.427			2.679.204.072	-	APBD	DINAS KESEHATAN
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	<i>Media</i>			9.526	9.526	65.615.000	-	APBD	
b	Reagen Zn TB	<i>Paket</i>			350	350	63.140.000	-	APBD	
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	<i>Paket</i>			1.808	1.808	31.062.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
Kabupaten/Kota										
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket			16.411	16.411	128.174.272	-	APBD	
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang			9.427	9.427	2.379.374.800	-	APBD	
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			1.812	1.812	11.838.000	-	APBD	
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen			33	33	-	-		
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang			33	33	-	-		
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			33	33	-	-		
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			33	33	-	-		
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang			6	6	-	-		
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			33	33	-	-		
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			78	78	-	-		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	Orang	13.035	13.035			547.406.150	-	APBD	DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Immunodeficiency Virus)									
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket			13.035	13.035	236.000.000	-	APBD	
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket			13.035	13.035	181.056.150	-	APBD	
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket			13.035	13.035	65.175.000	-	APBD	
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			32	32	-	-		
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			32	32	-	-		
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			32	32	-	-		
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			32	32	-	-		
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			32	32	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	<i>Orang</i>			32	32	-	-		

Tabel 3.11 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR (2022)	PENCAPAIAN SPM 2023					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	1.420	1.150	1.150			14.212.333.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	1.420			1150	1150	11.199.833.000	-	DAK	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>	1.420			1150	1150		-	DAK	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>	150			450	450	3.012.500.000	-	APBD	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>	150			450	450		-	APBD	DPUPR

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR (2022)	PENCAPAIAN SPM 2023					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		1.832	1.612	1.612			4.359.188.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	458			229.127	403	3.564.188.000	-	DAK	DPUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>	458			229.127	403	615.000.000	-	DAK	DPUPR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	458			229.127	403		-	DAK	DPUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>	546				500	100.000.000	-	APBD	DPUPR

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR (2022)	PENCAPAIAN SPM 2023					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>	546				500	80.000.000	-	APBD	DPUPR
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>	546				500		-	APBD	DPUPR

Tabel 3.12 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	1.946	1.946			15.757.433.860	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			850	850	10.457.433.860	-	DAK	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			96	96	1.300.000.000	-	APBD	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>			500	500	2.000.000.000	-	APBD	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>			500	500	2.000.000.000	-	APBD	
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air		2.205	2.205			15.967.250.000	-	DAK dan APBD	DPUPR

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	limbah domestik- Satuan KK/SR									
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>			905	905	8.552.250.000	-	DAK	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>			500	500	4.500.000.000	-	APBD	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>			300	300	2.835.000.000	-	APBD	
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>						-		
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan)	<i>Rumah Tangga</i>						-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)									
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>			500	500	80.000.000	-	APBD	

Tabel 3.13 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	2.400	2.400			19.900.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			1000	1000	12.500.000.000	-	DAK	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			200	200	2.600.000.000	-	APBD	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	2.400.000.000	-	APBD	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	2.400.000.000	-	APBD	
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		2.600	2.600			18.726.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>			1000	1000	9.450.000.000	-	DAK	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	5.400.000.000	-	APBD	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>			400	400	3.780.000.000	-	APBD	
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>						-		
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk	<i>Rumah Tangga</i>						-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2025					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	>25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)									
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	96.000.000	-	APBD	

Tabel 3.14 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	2.900	2.900			24.500.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			1200	1200	15.000.000.000	-	DAK	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			300	300	3.900.000.000	-	APBD	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>			700	700	2.800.000.000	-	APBD	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>			700	700	2.800.000.000	-	APBD	
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3.100	3.100			23.406.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>			1200	1200	11.340.000.000	-	DAK	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	<i>Rumah Tangga</i>			700	700	6.300.000.000	-	APBD	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	5.670.000.000	-	APBD	
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>						-		
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah	<i>Rumah Tangga</i>						-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	perkotaan)									
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	96.000.000	-	APBD	

Tabel 3.15 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Blora 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027				SUMBER	INSTANSI
----	---------------------------	--------	---------------------	--	--	--	--------	----------

	LAYANAN SPM		PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN	INISIASI	PENDANAAN	PELAKSANA
	Kabupaten/Kota									
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	3.400	3.400			29.100.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			1400	1400	17.500.000.000	-	DAK	
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Sambungan Rumah/SR</i>			400	400	5.200.000.000	-	APBD	
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	<i>Rumah Tangga</i>			800	800	3.200.000.000	-	APBD	
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	<i>Rumah Tangga</i>			800	800	3.200.000.000	-	APBD	
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		3.400	3.400			26.196.000.000	-	DAK dan APBD	DPUPR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>			1300	1300	12.285.000.000	-	DAK	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk	<i>Rumah Tangga</i>			800	800	7.200.000.000	-	APBD	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN		
	Kabupaten/Kota								
	<25 jiwa/hektar)								
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>			700	700	6.615.000.000	-	APBD
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	<i>Rumah Tangga</i>					-		
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	<i>Rumah Tangga</i>					-		
6	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	<i>Rumah Tangga</i>			600	600	96.000.000	-	APBD

Tabel 3.16 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Blora 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN DASAR (2022)	PENCAPAIAN SPM 2023					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	156	36	36			400.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>rumah</i>	0						-		
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>	17			0	0	-	-		
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>	22			9	9	400.000.000	-	APBD	
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	<i>rumah</i>	0						-		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang		144	144			40.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>rumah</i>	0			0	0		-		
b	Subsidi uang sewa	<i>rumah</i>	0			36	36	40.000.000	-	APBD	
c	Penyediaan rumah layak huni	<i>rumah</i>	0			0	0		-		

Tabel 3.17 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Blora 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2024					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	36	36			400.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>rumah</i>						-		
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			0	0	-	-		
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			9	9	400.000.000	-	APBD	
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	<i>rumah</i>						-		
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	144	144			40.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>rumah</i>			0	0		-		
b	Subsidi uang sewa	<i>rumah</i>			36	36	40.000.000	-	APBD	
c	Penyediaan rumah layak huni	<i>rumah</i>			0	0		-		

Tabel 3.18 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Blora 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	36	36			400.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>rumah</i>						-		
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			0	0	-	-		
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			9	9	400.000.000	-	APBD	
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	<i>rumah</i>						-		
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	144	144			40.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>rumah</i>			0	0		-		
b	Subsidi uang sewa	<i>rumah</i>			36	36	40.000.000	-	APBD	
c	Penyediaan rumah layak huni	<i>rumah</i>			0	0		-		

Tabel 3.19 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Blora 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2026					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	36	36			400.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>rumah</i>						-		
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			0	0	-	-		
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			9	9	400.000.000	-	APBD	
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	<i>rumah</i>						-		
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	144	144			40.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>rumah</i>			0	0		-		
b	Subsidi uang sewa	<i>rumah</i>			36	36	40.000.000	-	APBD	
c	Penyediaan rumah layak huni	<i>rumah</i>			0	0		-		

Tabel 3.20 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Blora 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM 2027					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	36	36			400.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>rumah</i>						-		
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			0	0	-	-		
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>rumah</i>			9	9	400.000.000	-	APBD	
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	<i>rumah</i>						-		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	orang	144	144			40.000.000	-	APBD	DINRUMKIMHUB
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>rumah</i>			0	0		-		
b	Subsidi uang sewa	<i>rumah</i>			36	36	40.000.000	-	APBD	
c	Penyediaan rumah layak huni	<i>rumah</i>			0	0		-		

Tabel 3.21 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Blora 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	Sub Urusan Trantibum										
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	<i>Orang</i>	100	241	241			857.677.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	<i>unit</i>	98			69	69	697.694.000	-		
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>	24			6	6	6.000.000	-		
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	<i>orang</i>	1			260	260	119.983.000	-		
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	<i>dokumen</i>	1			1	1	5.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>	-			1	1	5.000.000	-		
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<i>orang</i>	-			1	1	5.000.000	-		
	Sub Urusan Kebencanaan										
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<i>orang</i>	911.248	911.248	911.248			34.677.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	<i>dokumen</i>	1			1	1	-	-		
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>	911.248			851.796	851.796	-	-		
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	<i>orang</i>	3.500			851.796	851.796	34.677.000	-		
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>	1			16	16	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>orang</i>	45.563	45.563	45.563			98.170.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	<i>unit</i>	1			1	1	-	-		
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>	24			23	23	98.170.000	-		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>orang</i>	4.000	4.000	4.000			399.390.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>	-			1	1	-	-		
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>	4.000			4.000	4.000	79.160.000	-		
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>	1			58	58	294.245.000	-		
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>	1			1	1	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>	1			1	1	25.985.000	-		
	Sub Urusan Damkar										
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	70	141	141			2.168.000.000	-	APBD	
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>	24			63	63	290.000.000	-		
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>	3			3	3	3.000.000	-		
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	175			36	36	156.710.000	-		
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	47			67	67	31.810.000	-		
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	-			78	78	362.875.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	-			1	1	5.000.000	-		

Tabel 3.22 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Blora 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Sub Urusan Trantibum									
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	270	270			1.112.922.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			74	74	519.157.000	-		
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>			15	15	15.000.000	-		
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	<i>orang</i>			2.515	2.515	563.765.000	-		
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	<i>dokumen</i>			1	1	5.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>			2	2	5.000.000	-		
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<i>orang</i>			2	2	5.000.000	-		
	Sub Urusan Kebencanaan									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<i>orang</i>	911.248	911.248			95.000.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	<i>dokumen</i>			1	1		-		
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>			854.351	854.351	25.000.000	-		
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	<i>orang</i>			854.351	854.351	50.000.000	-		
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>			16	16	20.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>orang</i>	45.563	45.563			370.000.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	<i>unit</i>			1	1	250.000.000	-		
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>			25	25	120.000.000	-		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>orang</i>	4.000	4.000			505.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	25.000.000	-		
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			4.000	4.000	85.000.000	-		
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			60	60	350.000.000	-		
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>			1	1		-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>			1	1	45.000.000	-		
	Sub Urusan Damkar									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	160	160			1.923.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>			65	65	300.000.000	-		
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>			3	3	3.000.000	-		
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>			40	40	159.900.000	-		
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>			91	91	25.000.000	-		
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>			85	85	400.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>			1	1	5.000.000	-		

Tabel 3.23 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Blora 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Sub Urusan Trantibum									
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	290	290			1.851.210.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			119	119	1.571.210.000	-		
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>			10	10	10.000.000	-		
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	<i>orang</i>			357	357	250.000.000	-		
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	<i>dokumen</i>			1	1	5.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>			2	2	5.000.000	-		
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<i>orang</i>			2	2	5.000.000	-		
	Sub Urusan Kebencanaan									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<i>orang</i>	911.248	911.248			260.000.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	<i>dokumen</i>			1	1	150.000.000	-		
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>			856.914	856.914	25.000.000	-		
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	<i>orang</i>			800.000	800.000	60.000.000	-		
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>			16	16	25.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>orang</i>	45.563	45.563			450.000.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	<i>unit</i>			1	1	300.000.000	-		
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>			26	26	150.000.000	-		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>orang</i>	4.000	4.000			530.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	30.000.000	-		
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			4.000	4.000	90.000.000	-		
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			60	60	360.000.000	-		
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>			1	1	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>			1	1	50.000.000	-		
	Sub Urusan Damkar									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	165	165			1.915.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>			70	70	320.000.000	-		
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>			3	3	3.000.000	-		
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>			210	210	2.456.740.000	-		
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>			91	91	145.000.000	-		
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>			95	95	580.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>			2	2	6.000.000	-		

Tabel 3.24 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Blora 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Sub Urusan Trantibum									
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	300	300			1.280.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			105	105	128.860.000	-		
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>			15	15	15.000.000	-		
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	<i>orang</i>			740	740	475.000.000	-		
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	<i>dokumen</i>			1	1	5.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>			3	3	6.000.000	-		
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<i>orang</i>			3	3	6.000.000	-		
	Sub Urusan Kebencanaan									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<i>orang</i>	911.248	911.248			130.000.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	<i>dokumen</i>			1	1	-	-		
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>			859.485	859.485	30.000.000	-		
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	<i>orang</i>			800.000	800.000	70.000.000	-		
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>			16	16	30.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>orang</i>	45.563	45.563			520.000.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	<i>unit</i>			1	1	350.000.000	-		
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>			26	26	170.000.000	-		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>orang</i>	4.000	4.000			555.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	35.000.000	-		
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			4.000	4.000	95.000.000	-		
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			60	60	370.000.000	-		
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>			1	1	-	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>			1	1	55.000.000	-		
	Sub Urusan Damkar									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	180	180			1.914.400.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>			80	80	525.000.000	-		
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>			3	3	3.000.000	-		
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>			190	190	455.740.000	-		
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>			91	91	150.000.000	-		
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>			100	100	675.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>			2	2	6.000.000	-		

Tabel 3.25 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Blora 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	Sub Urusan Trantibum									
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	<i>Orang</i>	320	320			652.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			105	105	140.000.000	-		
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>			20	20	20.000.000	-		
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	<i>orang</i>			740	740	475.000.000	-		
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	<i>dokumen</i>			1	1	5.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>			3	3	6.000.000	-		
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	<i>orang</i>			3	3	6.000.000	-		
	Sub Urusan Kebencanaan									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<i>orang</i>	911.248	911.248			140.000.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	<i>dokumen</i>			1	1		-		
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	<i>orang</i>			862.064	862.064	30.000.000	-		
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	<i>orang</i>			800.000	800.000	75.000.000	-		
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	<i>unit</i>			16	16	35.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>orang</i>	45.563	45.563			550.000.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	<i>unit</i>			1	1	350.000.000	-		
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>			26	26	200.000.000	-		
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>orang</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	580.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	40.000.000	-		
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			4.000	4.000	100.000.000	-		
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			60	60	380.000.000	-		
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>			1	1		-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>			1	1	60.000.000	-		
	Sub Urusan Damkar									
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	<i>orang</i>	200	200			1.914.400.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>			90	90	650.000.000	-		
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>			3	3	3.000.000	-		
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>			200	200	2.384.400.000	-		
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>			91	91	150.000.000	-		
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>			110	110	850.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>			3	3	7.000.000	-		

Tabel 3.26 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	84	61	61			196.800.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	84			41	41	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	42			20	20	5.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang	84			61	61	1.050.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang	42			20	20	1.000.000	-		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	84			41	41	180.750.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	84			61	61	1.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	84			61	61	1.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	84			10	10	1.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	84			2	2	1.000.000	-		
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/	orang	42			7	7	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
	fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan										
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	42			20	20	1.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	42			10	10	1.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang	42			10	10	1.000.000	-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	20	12	12			68.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	20			12	12	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			12	12	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang	20			12	12	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang	20			12	12	3.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	20			12	12	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	20			12	12	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	orang	20			5	5	10.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	20			3	3	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	20			2	2	1.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	20			12	12	2.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	20			10	10	8.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang	20			2	2	8.000.000	-		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	21	10	10			68.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	21			10	10	1.000.000	-		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	1			10	10	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang	21			10	10	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang	21			10	10	3.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	21			10	10	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	21			10	10	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	21			5	5	7.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	21			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
i	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang	21			2	2	3.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	21			10	10	2.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	21			5	5	8.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang	21			5	5	8.000.000	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	19	12	12			67.000.000	-	APBD	
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	19			12	12	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	19			12	12	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang	19			12	12	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang	19			12	12	2.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	19			12	12	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	19			12	12	10.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	19			10	10	5.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	19			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TAHUN 2022	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2023)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota										
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	19			2	2	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	19			12	12	2.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	19			7	7	8.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang	19			5	5	8.000.000	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	216	150	150			180.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Penyediaan Permakanan	orang	216			150	150	60.000.000	-		
b	Penyediaan Sandang	orang	50			20	20	8.485.000	-		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			2	2	15.985.000	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	20			50	50	65.600.000	-		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	216			150	150	29.930.000	-		

Tabel 3.27 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	25	25			200.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			25	25	5.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			25	25	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			25	25	5.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			10	10	4.000.000	-		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			20	20	150.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			15	15	6.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang			25	25	8.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			20	20	2.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			5	5	1.000.000	-		
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/	orang			3	3	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan									
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			10	10	3.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			5	5	6.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			10	10	8.000.000	-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	11	11			75.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			11	11	3.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			11	11	10.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			11	11	13.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			11	11	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			11	11	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			11	11	5.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	orang			4	4	4.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			2	2	1.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			11	11	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			8	8	10.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			3	3	8.000.000	-		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	10	10			75.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			12	12	3.000.000	-		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			12	12	13.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			12	12	5.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			12	12	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			12	12	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			12	12	4.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang			3	3	1.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			12	12	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			10	10	10.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			2	2	13.000.000	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	10	10			75.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			10	10	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			10	10	9.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			10	10	15.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			10	10	5.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			10	10	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			10	10	2.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			4	4	2.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2024)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			10	10	10.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			4	4	5.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			6	6	10.000.000	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	100	100			180.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Penyediaan Permakanan	orang			100	100	60.000.000	-		
b	Penyediaan Sandang	orang			20	20	8.485.000	-		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			2	2	15.985.000	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			50	50	65.600.000	-		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			100	100	29.930.000	-		

Tabel 3.28 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	28	28			225.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			28	28	2.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			28	28	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			28	28	5.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			10	10	4.000.000	-		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			18	18	175.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			28	28	6.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang			28	28	8.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			8	8	3.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			5	5	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			5	5	1.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			28	28	5.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			20	20	5.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			10	10	9.000.000	-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	14	14			80.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			14	14	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			14	14	5.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			14	14	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			14	14	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			14	14	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			14	14	5.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	orang			9	9	2.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			2	2	1.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			14	14	10.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			9	9	15.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			5	5	15.000.000	-		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	13	13			80.000.000	-	APBD DINAS SOSIAL P3A	
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			13	13	1.000.000	-		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			13	13	5.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			13	13	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			13	13	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			13	13	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			13	13	8.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang			5	5	5.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			13	13	15.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			5	5	5.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			8	8	10.000.000	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	12	12			80.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			12	12	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			12	12	5.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			12	12	11.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			12	12	5.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			12	12	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			12	12	3.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			3	3	10.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2025)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			12	12	10.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			3	3	4.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			9	9	15.000.000	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	120	120			200.000.000	-	APBD DINAS SOSIAL P3A	
a	Penyediaan Permakanan	orang			120	120	90.000.000	-		
b	Penyediaan Sandang	orang			25	25	5.000.000	-		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			2	2	10.000.000	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			60	60	25.000.000	-		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			120	120	70.000.000	-		

Tabel 3.29 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	30	30			275.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			30	30	5.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			30	30	7.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			30	30	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			10	10	4.000.000	-		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			20	20	200.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			30	30	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang			30	30	5.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			10	10	2.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			4	4	1.000.000	-		
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/	orang			6	6	7.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan									
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			30	30	4.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			5	5	10.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			10	10	10.000.000	-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	15	15			85.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			15	15	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			15	15	6.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			15	15	13.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			15	15	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			15	15	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			15	15	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	orang			10	10	10.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			2	2	1.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			15	15	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			10	10	8.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			5	5	15.000.000	-		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	14	14			85.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			14	14	1.000.000	-		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			14	14	10.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			14	14	15.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			14	14	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			14	14	10.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			14	14	8.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang			4	4	5.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			14	14	10.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			4	4	5.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			9	9	10.000.000	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	15	15			82.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			15	15	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			15	15	7.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			15	15	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			15	15	5.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			15	15	15.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			15	15	2.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			6	6	1.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2026)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			15	15	10.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			6	6	10.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			9	9	15.000.000	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	135	135			220.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Penyediaan Permakanan	orang			135	135	110.000.000	-		
b	Penyediaan Sandang	orang			20	20	10.000.000	-		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			2	2	10.000.000	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			60	60	25.000.000	-		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			135	135	65.000.000	-		

Tabel 3.30 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2027

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	33	33			300.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			33	33	5.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			33	33	1.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			33	33	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			13	13	4.000.000	-		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			20	20	200.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			33	33	15.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang			33	33	15.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			20	20	15.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			5	5	1.000.000	-		
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/	orang			4	4	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
	fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan									
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			33	33	3.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			23	23	15.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			10	10	15.000.000	-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	17	17			90.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			17	17	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			17	17	8.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			17	17	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			17	17	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			17	17	1.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			17	17	10.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Anak Terlantar	orang			10	10	10.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			2	2	1.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			17	17	10.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			10	10	15.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			7	7	18.000.000	-		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	15	15			90.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			15	15	1.000.000	-		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			15	15	3.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			15	15	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			15	15	5.000.000	-		
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			15	15	12.000.000	-		
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			15	15	8.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang			6	6	10.000.000	-		
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
i	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			15	15	10.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			6	6	10.000.000	-		
l	Layanan Rujukan	orang			9	9	15.000.000	-		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	16	16			85.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			16	16	1.000.000	-		
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			16	16	8.000.000	-		
c	Penyediaan Permakanan	orang			16	16	10.000.000	-		
d	Penyediaan Sandang	orang			16	16	5.000.000	-		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			16	16	15.000.000	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			16	16	2.000.000	-		
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			6	6	3.000.000	-		
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			2	2	1.000.000	-		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	PENCAPAIAN SPM (TAHUN 2027)					INISIASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
			PENERIMA LAYANAN DASAR	REALISASI	MUTU LAYANAN	REALISASI	ANGGARAN			
	Kabupaten/Kota									
j	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			2	2	5.000.000	-		
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			16	16	10.000.000	-		
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			6	6	10.000.000	-		
m	Layanan Rujukan	orang			10	10	15.000.000	-		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	150	150			250.000.000	-	APBD	DINAS SOSIAL P3A
a	Penyediaan Permakanan	orang			150	150	120.000.000	-		
b	Penyediaan Sandang	orang			30	30	15.000.000	-		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			2	2	10.000.000	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			65	65	30.000.000	-		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			150	150	75.000.000	-		

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang

ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.

4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan/explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Blora, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran

maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan Daerah antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain?
5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan

koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM

Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
2. Bagaimana SPM diposisikan?
3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM**

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. *Kesimpulan*

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Blora masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. *Saran*

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Blora.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Blora berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Blora secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Blora.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN